



FINAL REPORT

**KAJIAN PERAN PEREMPUAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN DONGGALA**

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB&PP)
KABUPATEN DONGGALA**

2013

KATA PENGANTAR

Fuji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan izinnya Juallah sehingga Penyusunan Laporan Akhir **Kajian Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala** dapat diselesaikan tepat waktu.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan. Perempuan sebagai bagian terbesar dari kelompok miskin tentunya menjadi potensi besar bagi pembangunan di Indonesia.

Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan partisipasi perempuan perlu mendapat perhatian agar segera tercapai kesejahteraan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan selama ini kurang memperhatikan peran perempuan miskin. Perempuan ditempatkan sebagai objek sehingga program pengentasan kemiskinan kurang memberikan hasil signifikan, sehingga muncul gagasan upaya pemberdayaan perempuan untuk pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ini diharapkan mampu menekan kemiskinan di perdesaan saat kemiskinan di perdesaan terus bertambah karena melonjaknya kenaikan harga kebutuhan pangan.

Semoga laporan ini, dapat memberikan manfaat yang optimal, dan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunannya.

Palu, Mei 2013

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	hal.
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
B. Kereangka Pemikiran	40
C. Definisi Konseptual & Operationalisasi Variabel	42
BAB 3 METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Indikator/Parameter Penelitian	47
E. Model Analisis	47
F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian	48
BAB 4 HASIL PENELITIAN	
A. Karakteristik Responden	49
B. Peranan Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan	58
C. Strategi Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin	62
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Simpulan	82
B. Rekomendasi	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan yang sangat mendorong usaha pembangunan adalah memperbaiki kehidupan rakyat tanpa perbedaan, dalam arti meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tersebut, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat yang kurang berpotensi, baik itu laki-laki maupun perempuan utamanya masyarakat pengangguran atau yang tidak memiliki pekerjaan. Secara mendasar tugas tersebut merupakan tugas seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, namun terlebih lagi merupakan tugas dan kewajiban pemerintah, karena pemerintah merupakan roda penggerak dalam kemajuan suatu negara.

Peranan pemerintah dalam pembangunan merupakan keharusan yang bersifat mutlak, karena itu pelaksanaannya oleh aparat pemerintah yang diberikan wewenang harus cukup bijaksana, mampu dan terampil. Kebijakan dalam keterampilan terletak pada kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut dalam masa pembangunan sekarang ini.

Dalam pembangunan nasional, pemerintah tetap mempunyai peranan sentral, baik secara perencanaan, penggerak, maupun pengendali

pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal, namun penelitian ini hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia yaitu kepada perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sangat terasa. Hal ini disebabkan karena konstruksi sosial yang telah berhasil mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai kehidupan. Menurut analisis gender adanya perbedaan sex antara perempuan dan laki-laki bukan berarti harus pula dibeda-bedakan tugas dan fungsi mereka dalam masyarakat karena pada dasarnya kemampuan manusia itu sama. Namun karena adanya sebuah konstruksi sosial yang telah berhasil memetakan pola kehidupan antara peran perempuan dan peran laki-laki di dalam masyarakat, yaitu laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat dibanding dengan perempuan sehingga mereka diberi tanggung jawab sebagai pekerja di bidang produksi, sementara perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah lembut sehingga mereka hanya cocok sebagai pekerja ibu rumah tangga atau pekerja domestik.

Pembagian peran dan fungsi inilah yang telah menghambat perkembangan kemajuan perempuan, mereka selalu dipandang sebagai makhluk yang lemah sehingga perempuan terlalu termanjakan oleh budaya yang telah lahir di daerah masing-masing. Perempuan pun telah berhasil terhipnotis oleh konstruksi sosial tersebut sehingga mereka benar-benar menganggap dirinya hanya cocok di dapur mengurus anak dan suami, walaupun mereka memiliki kesibukan di luar rumah, hanya sedikit saja waktu luang yang harus mereka gunakan karena tugas utama mereka hanyalah di rumah.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan. Perempuan sebagai bagian terbesar dari kelompok miskin tentunya menjadi potensi besar bagi pembangunan di Indonesia.

Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan partisipasi perempuan perlu mendapat perhatian agar segera tercapai kesejahteraan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan selama ini kurang memperhatikan peran perempuan miskin. Perempuan ditempatkan sebagai objek sehingga program pengentasan kemiskinan kurang memberikan hasil signifikan, sehingga muncul gagasan upaya pemberdayaan perempuan untuk pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ini diharapkan mampu menekan kemiskinan di perdesaan saat kemiskinan di perdesaan terus bertambah karena melonjaknya kenaikan harga kebutuhan pangan.

Sistem nilai yang memposisikan tugas utama perempuan sebagai istri di rumah tangga didukung oleh nilai yang dikembangkan melalui agama, kepercayaan dan kebijakan pemerintahan. Perempuan digambarkan mempunyai sifat halus, lembut, sabar, setia, pandai meredam gejolak (Kartodirdjo, 1993). Hal ini selanjutnya direduksi dalam distribusi kekuasaan maupun akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang berperan penting dalam menentukan pendapatan. Perlu reorientasi pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan akar persoalan yang menyebabkan ketidak berdayaan perempuan dalam kemiskinan.

Diperlukan model pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan sumberdaya perdesaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Pendekatan yang mengedepankan proses pendidikan dan

penyadaran agar perempuan miskin memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya perdesaan. Diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, dan ketidakdilan dalam pemanfaatan sumberdaya perdesaan menjadi salah satu akar persoalan masalah kemiskinan di perdesaan. Upaya peningkatan kapasitas perempuan dengan memperhatikan status perempuan dalam pengentasan kemiskinan amat penting. Hal ini didukung oleh rekomendasi untuk pencapaian pembangunan sesuai dengan Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium yakni diantaranya meningkatkan peran perempuan agar menjadi perhatian khusus dalam proses pembangunan. Program pembangunan akan berhasil dengan meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat sesuai salah satu tujuan pembangunan millenium MDGs dengan salah satu indikator pencapaian pada tahun 2015 mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemberdayaan perempuan miskin di perdesaan dilakukan dalam rangka untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan agar perempuan secara aktif mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan dengan memperhatikan pemecahan issue tentang partisipasi perempuan dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan perdesaan telah melakukan banyak pekerjaan di ranah domestik maupun publik, namun perempuan perdesaan masih tetap terpinggirkan dalam menjangkau sumberdaya yang tersedia.

Kemiskinan rakyat Indonesia bukan disebabkan oleh tidak adanya faktor-faktor produksi produktif yang dimiliki, akan tetapi mereka miskin karena tidak mempunyai kesempatan-kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, dan disebabkan oleh struktur serta tata nilai yang terjadi pada komunitas mereka, (Romo Mangunwijaya dalam Sanusi Hamid, 2000). Selanjutnya Adi Sasono, (1987) menjelaskan bahwa secara spesifik,

keterbelakangan dan kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia disebabkan oleh penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai proses eksploitasi. Makna eksploitasi ini menyangkut 3 bentuk yaitu: (1) pertukaran yang tidak adil dalam perdagangan barang, (2) pembayaran upah yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja dan (3) pengenaan pungutan yang relatif memberatkan dari pengusaha terhadap rakyat kecil.

Bentuk eksploitasi ini sangat terlihat perbedaan yang signifikan pada berbagai tipe agrosistem yang ada, seperti agrosistem persawahan, agrosistem nelayan (pesisir), agrosistem dataran tinggi (pegunungan) dan agrosistem perkotaan. Pada agrosistem persawahan permasalahan yang sering terjadi adalah tingkat upah buruh tani atau penggarap yang relatif rendah, sistem pemasaran hasil yang menyebabkan sistem pemasaran produk agrosistem sawah menjadi tidak efisien sehingga tingkat harga yang diterima petani lebih rendah dibanding dengan tingkat harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Terjadinya permasalahan ini diakibatkan karena penguasaan lahan relatif sempit (petani gurem), tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi relatif rendah serta jumlah tanggungan keluarga yang sangat banyak. Disamping itu penguasaan modal (*asset*) relatif rendah serta terjadinya fluktuasi harga.

Agrosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang didominasi oleh nelayan terbelenggu oleh masalah sistem bagi hasil yang tidak proporsional. Hasil riset menunjukkan bahwa proporsi yang diperoleh nelayan berkisar 10-15 % dari nilai hasil tangkapan, sedangkan untuk punggawa memperoleh proporsi 70-80 % dan selebihnya untuk iuran dan pungutan lainnya. Terjadinya hal demikian diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, tidak tersedianya jenis & keragaman pekerjaan, curahan waktu untuk bekerja rendah. Disamping itu masyarakat pada agrosistem nelayan dan pulau-

pulau kecil juga mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, penguasaan modal rendah serta aksesibilitas sangat rendah (Mahfud, 2012).

Agrosistem dataran tinggi (pegunungan) yang didominasi oleh produk perkebunan, hortikultura dan kehutanan, permasalahan yang dominan adalah penguasaan dan penerapan teknologi yang sulit, pendidikan rendah akibat dari aksesibilitas rendah karena aspek topografi serta krisinya Sumber Daya Alam seperti air dan perubahan iklim. Selain ini pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang sangat kurang sehingga terdapat tingkat curahan waktu untuk menganggur lebih tinggi serta penguasaan modal sangat rendah.

Agrosistem perkotaan yang biasanya didominasi oleh pekerja sektor non formal yang berada pada pemukiman kumuh sangat terkait dengan pekerjaan yang tidak menetap, jumlah tanggungan keluarga yang besar, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan sangat tidak kompetitif, serta tingkat curahan kerja bagi anggota keluarga sangat rendah untuk mengakses pekerjaan atau tingkat pengangguran yang sangat tinggi serta penguasaan modal yang rendah.

Struktur kemiskinan di Indonesia hampir merata pada seluruh tipe agrosistem. Kemiskinan penduduk Indonesia memperlihatkan bahwa rata-rata penduduk miskin perkotaan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dibanding dengan penduduk miskin di pedesaan, jika dikaitkan dengan fenomena migrasi desa kota. Profil tentang kemiskinan di Indonesia diakibatkan oleh adanya sistem migrasi desa kota. Moeis (1993) menyatakan bahwa kelompok pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA atau sederajat sering melakukan peralihan profesi pekerjaan dan cenderung lebih lama mencari pekerjaan lebih lama dibanding dengan yang berpendidikan rendah.

Selanjutnya Chernichovsky dan Meesook (1984) dalam Sanusi Hamid (2000) menyatakan bahwa rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak dan hanya kepala rumah tangganya yang bekerja. Fenomena ini sangat sesuai dengan ciri-ciri rumahtangga miskin yang dikemukakan oleh Boateng (1990) yaitu terkonsentrasi di daerah pedesaan, konsumsi makanannya cukup dominan dalam pengeluaran (66%), penghasilan utamanya dari sektor pertanian (55,8%) dan (28,2%) dari sektor non pertanian, tingkat kesehatan dan pendidikan rendah.

Data dari Kementrian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Donggala sebesar 17,45 % (di bawah garis kemiskinan) dari 16 Kecamatan yang berada di Kabupaten Donggala, dan terdapat 2,03% yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan, diantaranya Kecamatan Labuan sebesar 1,70%.

Upaya pengentasan penduduk miskin pada saat ini jauh lebih sukar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan tidak semata mengandalkan pada kebijakan ekonomi makro tetapi harus diimbangi dengan kebijakan ekonomi mikro berupa terobosan-terobosan yang langsung memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan golongan miskin. Beberapa upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah misalnya Inpres Desa Tertinggal (IDT), program pengentasan kemiskinan keluarga prasejahtera, dan sejahtera I, II dan III+, proyek P4K (Peningkatan Pendapatan Petani nelayan Kecil, serta beberapa proyek bantuan seperti Takesra, Kukesra yang semuanya tidak mampu berpengaruh signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Peningkatan persentase masyarakat miskin sekali dan miskin dengan alasan ekonomi disebabkan oleh tidak terintegrasinya program-program pengentasan kemiskinan, terdapatnya keragaman data akibat indikator pengukuran kemiskinan yang beragam, belum sinkronnya regulasi dan kebijakan serta strategi yang diberlakukan tidak berdasarkan spesifikasi lokasi. Disamping itu program yang ditawarkan tidak berkesinambungan, bahkan hanya sekedar formalitas dan rutinitas sehingga pelaksanaan setiap program masih mendapatkan hambatan-hambatan.

Berdasarkan kondisi ril dan hasil kajian di atas maka dipandang penting untuk melakukan kajian “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang ingin dikaji adalah :

1. Bagaimana peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala?
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Donggala.
3. Bagaimana model atau tindakan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Donggala.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam kajian penelitian dan pengembangan ini adalah:

1. Melakukan analisis terhadap peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Donggala.

3. Merumuskan bentuk strategi yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Donggala.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Donggala dan *stakeholder* mengenai peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala.
2. Melahirkan suatu strategi dan model pengembangan untuk mengentaskan masyarakat miskin di Kabupaten Donggala.
3. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang upaya peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di daerah lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan diperhadapkan dengan berbagai problema pembangunan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana umum, tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi yang tinggi, serta kemiskinan masyarakat. Problema mendasar yang sering dijadikan dasar penilaian hasil pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan.

Namun gejala yang paling menonjol adalah rendahnya pendapatan masyarakat atau dapat diidentikkan dengan kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dapat mempengaruhi tempramen sosial budaya dan emosional masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku yang kurang rasional seperti cepat marah dan mudah untuk dipropokasi kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

Karena problema kemiskinan bersifat multidimensional, maka strategi pengang-gulangnya juga harus bersifat multidimensional pula. Selama

ini yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah bersifat ekonomi semata-mata, sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai. Hal ini berarti mengalami persoalan - persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau politis. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan lapisan masyarakat miskin (Tjokrowinoto, 1993) :

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial-politis. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politik dimana orang miskin tersebut tinggal.
- b. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. Artinya biarkan kesadaran kritis orang miskin muncul dan bersamaan itu biarkan pula melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.
- c. Tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial. Nasib orang miskin bukannya tidak dapat dirubah, tetapi dapat dirubah dan yang mempunyai kekuatan untuk merubah adalah diri sendiri. Artinya Tuhan melahirkan setiap umatnya di dunia dalam keadaan yang sama. Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk Tuhan tetapi produk masyarakat itu sendiri (the social construction).

- d. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Sebagai contoh adalah bagaimana merealisasikan program proyek Kawasan Terpadu (PKT) dengan perumus utama proyek itu adalah lapisan miskin. Ini hanya bisa tercapai kalau komunikasi politik antara pemegang kekuasaan, kelompok-kelompok dan person-person strategis, dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi politik distorsi, maka rumusan pembangunan hanya mencerminkan kepentingan bukan lapisan miskin.
- e. Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktur yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitasnya.
- f. Diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Meskipun keempat langkah di atas dapat dipenuhi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, masyarakat miskin tetap saja tidak memperoleh akses ekonomi yang akibatnya tidak memiliki juga akses ke bidang-bidang lainnya. Dengan demikian butir-butir usulan itu seyogyanya dilakukan simultan dan terpadu.

Apabila langkah-langkah itu dapat dilaksanakan secara terpadu, maka kemiskinan akan dapat ditanggulangi, dan apabila kemiskinan dapat ditanggulangi maka ketimpangan akan surut pula. Langkah-langkah di atas merupakan gambaran bahwa antara deregulasi ekonomi dan deregulasi politik tidak dapat dipisahkan.

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan dalam berbagai pendekatan. Salah satu diantaranya adalah pemberdayaan

masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan hal yang sama sekali baru, tetapi sebagai strategi dalam pembangunan relatif belum terlalu lama dibicarakan. Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu yang lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1997: 74).

Konsep pembangunan masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua teknik, yaitu partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Kedua teknik pembangunan ini merupakan proses pemberdayaan yang berarti pembangunan harus bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat. Konsep pembangunan juga dapat dipahami sebagai program dan gerakan sosial. Sebagai program yaitu pembangunan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan titik berat pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan pembangunan masyarakat sebagai gerakan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan suatu ideologi.

Masalah pokok dari keterbelakangan bukanlah kurangnya bahan baku, melainkan ketidak mampuan penduduk desa untuk mengatasi keterbelakangan mereka dan menghilangkan rintangan-rintangan budaya, seperti sikap-sikap tradisional, pasrah nasib dan ketergantungan, baik secara individual maupun kolektif, fenomena ini harus dibuka oleh kondisi-kondisi eksternal yang melingkupinya. Pembangunan masyarakat merupakan perpaduan antara pengorganisasian masyarakat dengan

pengembangan ekonomi. Pengorganisa-sian dapat dilakukan dengan menanamkan perasaan solidaritas diantara mereka dan jiwa pembangun, sedangkan pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan pembelajaran *life-skill* baru atau memadukan dengan potensi yang dimilikinya, merangsang pemasaran hasil produksi, mendorong penciptaan modal, dan mengembangkan sikap menghargai kerja.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa bila mutunya tinggi. Untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.

2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan sering digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu yang merupakan pra syarat pemberdayaan.

Pengertian pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Visi pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Sedangkan Misinya adalah menyelenggarakan upaya upaya untuk menggerakkan (a) Peningkatan kualitas hidup perempuan, (b) Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan Gender, (c) Penghapusan segala bentuk tindak kekuasaan terhadap perempuan dan anak, (d) Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan, dan (e) Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk (a) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, (c) Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, (d) Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, dan (e) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

Arah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan adalah (a) Peningkatan partisipasi dan peranserta perempuan sebagai gerak ekonomi kerakyatan, (b) Peningkatan peran perempuan sebagai pendidik generasi masa mendatang (internalisasi tata nilai), (c) Peningkatan peran perempuan dalam PPMK, dan (d) Pembangunan berperspektif gender dengan memperhatikan kepentingan perempuan.

3. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika

fenomena kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka-angka. Ini seperti halnya dengan pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini menjadi perdebatan. Dengan kata lain, tidaklah mudah untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari garis batas kemiskinan. Jadi dalam hal ini kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hal ini disebabkan karena di dalam masyarakat kadang ada orang yang secara kuantitatif atau obyektif (apabila dihitung pendapatannya dengan rupiah) tergolong miskin, tetapi karena tinggal dalam lingkup budaya tertentu, orang tersebut merasa tidak miskin. Bahkan merasa cukup dan justru berterima kasih pada nasibnya.

Saat ini terdapat banyak cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Nugroho (1995) membagi cara pengukuran tingkat kemiskinan dengan dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Kemiskinan absolut selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis

kemiskinan. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat sebagai kebiasaan, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu masyarakat dan berbagai faktor lainnya.

Pada kemiskinan relatif, orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek-aspek materil saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non materil. Dengan demikian, mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena yang pada dasarnya bersifat “multi-faset” atau “integrated poverty”.

Robert Chambers (dalam Loekman Soetrisno : 1995) mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai “deprivation trap” atau jebakan kekurangan. Deprivation trap itu terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu :

- a. Kemiskinan itu sendiri
- b. Kelemahan fisik
- c. Keterasingan
- d. Kerentanan
- e. Ketidakberdayaan.

Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga tersebut. Kerentanan ini sering menimbulkan “poverty rackets” atau roda penggerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda yang berharga sehingga keluarga itu menjadi semakin dalam memasuki lembah kemiskinan.

Ketidakberdayaan keluarga miskin tercermin dalam kasus dimana elite desa yang dengan seenaknya mengfungsikan diri sebagai jaring yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin juga dimanifestasikan dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu oleh orang yang mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik dan ekonomi, dan lemahnya keluarga miskin to bargain. Ketidakberdayaan keluarga miskin inipun dapat menjadikan keluarga miskin secara cepat menjadi lebih miskin.

4. Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya dan politik). Karena sifat multidimensinal tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah. Namun untuk memahami seberapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif.

Ellis (1984) mengemukakan dimensi-dimensi yang terkait dengan gejala kemiskinan, yaitu :

- a. Kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.
- b. Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini, sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Untuk itu, serangan terhadap kemiskinan sama artinya dengan pengikisan budaya. Apabila budaya tersebut tidak dihilangkan, maka kemiskinan ekonomik juga sulit ditanggulangi.
- c. Kemiskinan berdimensi struktural atau politik, artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktural sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan di atas pada hakekatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, dan bersamaan dengan itu seyogyanya juga mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Hal ini sejalan

dengan pergeseran strategi pembangunan nasional, bahkan yang dikejar bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas manusia seutuhnya (sosial, budaya, dan politik).

5. Penyebab Kemiskinan

Menurut akar penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kemiskinan, secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patronclient, jiwa gotong royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan dalam banyak hal terjadi karena bukan seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena terus-menerus

sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan struktural. Menurut Soemardjan (1984), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka termasuk ke dalam golongan miskin yang tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut *unsikilled labour*. Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah (Soedjatmoko, 1986). Di kota seperti Surabaya, golongan masyarakat miskin ini umumnya tinggal di rumah-rumah petak atau permukiman kumuh yang padat, berjejal dan sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal.

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya walaupun terjadi sifatnya lamban sekali apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada lingkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan.

Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ud (1994), adanya ketergantungan inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin

untuk *bergaining* dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual pendek kata pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Pengertian dan definisi kemiskinan struktural, kendati menjadi alternatif konsep yang lebih disukai ilmuwan sosial. Tetapi, kelebihan definisi seperti yang dikemukakan Soemardjan (1984) di atas diakui atau tidak sesungguhnya cenderung bersifat ideologis dalam arti definisi di atas populer karena disana ada semangat dan nilai-nilai yang menggugat kemapanan dan status quo. Secara konseptual, definisi kemiskinan yang dikemukakan Selo Soemardjan sedikit-banyak bersifat normatif. Parsudi Suparlan, misalnya, seorang antropologi yang menyunting kumpulan tulisan tentang kemiskinan di perkotaan, dengan lugas menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan Selo Soemardjan kurang tajam dan tidak masuk akal (Suparlan, 1984)

6. Perangkap Kemiskinan

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual adalah dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurut Robert Chambers tersebut, inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (a) kemiskinan itu sendiri, (b) kelemahan fisik, (c) ketersaingan atau kadar isolasi, (d) kerentanan, dan (e) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling terkait satu dengan

yang lain sehingga merupakan perangkat kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang bagi hidup orang atau keluarga miskin.

Dari kelima dimensi diatas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan, menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty rackets* atau roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya.

Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus dimana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya bagi orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin di kesempatan yang lain mungkin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi (Loekman Soetrisno, dalam : Dewanta dkk, 1995).

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin acapkali mampu tetap survive dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang anak atau keluarga yang jatuh pada lingkaran setan atau perangkat kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit perangkat kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil yang pembangunan dan justru menjadi korban

pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas, dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan (Suyanto, 1996).

Secara empirik, banyak bukti memperlihatkan bahwa naiknya penduduk di atas garis kemiskinan tidak otomatis berarti penduduk tersebut hidupnya benar-benar bebas dari ancaman dan perangkap kemiskinan, melainkan penduduk tersebut sebenarnya hanya berpindah dari satu tahap kemiskinan yang terendah yaitu tahap destitute ke tahap apa yang disebut sebagai *near poor*. Dibandingkan dengan kelompok kemiskinan destitue, kelompok *near poor* ini menghadapi suatu krisis, maka dengancepat kelompok *near poor* ini melorot lagi ke status destitue. Sebuah keluarga petani yang termasuk kelompok *near poor* tidak mustahil terpaksa turun kelas menjadi kelompok destitue bila tanpa diduga panen mereka tiba-tiba gagal karena serangan hama, karena serangan banjir, atau karena onjloknya harga jual di pasaran akibat ulah spekulan gabah.

Dalam kenyataan bahkan acap kali terjadi, kelompok masyarakat yang termasuk cukupan atau kaya bukan kelompok *near poor* tiba-tiba harus mengalami penurunan status yang drastis, yakni masuk ke dalam kelompok “keluarga miskin baru”. Jadi, berbeda dengan kesan dan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini yang menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa turun dari waktu ke waktu, dalam kenyataan justru tidak jarang terjadi penambahan jumlah orang miskin. Studi yang dilakukan Bagong Suyanto di sejumlah daerah di Jawa Timur menemukan bahwa kelompok masyarakat yang selama dua – tiga tahun terakhir terpaksa turun statusnya dari kelompok cukupan menjadi “keluarga miskin baru” adalah kelompok petani cengkeh dan petani garam (Suyanto, 1996). Studi yang dilakukan Bagong Suyanto

tersebut, walau dengan jumlah sampel yang terbatas, namun membuktikan bahwa usaha untuk memberantas kemiskinan memang bukan hal yang mudah sebab apa yang dialami keluarga dan masyarakat miskin bukan sekedar kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya modal usaha saja, tetapi lebih dari itu yang sesungguhnya membelenggu keluarga dan masyarakat miskin adalah apa yang disebut Robert Chambers dengan istilah perangkap kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan.

7. Upaya Pengentasan Kemiskinan

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Diluar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, program Tekesra-Kukesra, KURK, membangun infrastruktur di perkumuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan da lam banyak hal justru semakin lebar.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995), pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari.

Disamping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Acap terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Dalam konteks ini, sebagai sebuah prakarsa baru, program GERDU TASKIN sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Sebab, sejak awal disadari bahwa tujuan program ini adalah memandirikan dan memberdayakan komunitas di tingkat lokal untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan menurut kemampuan dan inisiatif mereka sendiri secara terpadu.

Namun demikian, selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan baik di tingkat nasional, regional maupun lokal umumnya adalah dengan menerapkan pendekatan ekonomi semata, yang seringkali kurang mengabaikan peran kebudayaan dan konteks lokal masyarakat. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan

pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya (Karnaji, dkk 2000). Kendati secara harafiah nama berbagai program pengentasan kemiskinan dan program JPS berbeda-beda, tetapi substansinya sesungguhnya hampir sama, yakni memberikan aliran modal kepada masyarakat miskin dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Memang, untuk jangka pendek pemberian bantuan ekonomi itu bermanfaat. Tetapi, untuk jangka panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pemberian bantuan ekonomi saja ternyata justru melahirkan problema-problem baru yang tidak kalah ruwetnya. Bahkan, tidak mustahil terjadi diperolehnya bantuan modal pinjaman kredit justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha masyarakat miskin (Mubyarto, 1995). Salah satu penyebabnya adalah berpangkal dari kesalahan orang miskin itu sendiri yang kadang hidup boros. Tetapi, disisi lain, kesalahan juga bisa bersumber dari tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi yang memang tidak bisa dielakkan masyarakat miskin, sering menyebabkan mereka terpaksa harus mengalihkan dan memanfaatkan kredit yang diperoleh bukan untuk kegiatan produktif, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif (Chambers, 1987).

Penelitian yang dilakukan Bagong Suyanto (1991-1995) tentang peran berbagai lembaga kredit pedesaan seperti Perum Pegadaian, BPR, lembaga KURK, Kredit Usaha Tani, dan sebagainya yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kegiatan produktif masyarakat, menemukan ternyata banyak nasabah yang memanfaatkan kredit yang diperolehnya itu bukan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, terutama untuk makan sehari-

hari. Tekanan kebutuhan sehari-hari yang senantiasa mengancam dan kewajiban untuk menghidupi anak dan sebagainya telah membuat banyak keluarga atau golongan masyarakat miskin sulit untuk mengembangkan usahanya.

Sementara itu, studi yang dilakukan Karnaji dkk (2000), dalam batas-batas tertentu menemukan bahwa implementasi Program GERDU TASKIN di lapangan ternyata tidak selalu seperti yang diharapkan. Belum jelasnya siapa sebenarnya kelompok sasaran yang diprioritaskan, dan masih adanya ego sektoral di masing-masing departemen, serta ditambah lagi dengan orientasi program yang belum bersifat kontekstual, maka bisa dipahami jika pelaksanaan berbagai program penghapusan kemiskinan belum memperlihatkan hasil daya ungkit yang memadai. Bahkan, dalam beberapa hal, pelaksanaan program GERDU TASKIN yang semula diharapkan dapat memberdayakan penduduk miskin, ternyata dalam kenyataan justru melahirkan bentuk ketergantungan baru dan berbagai penyimpangan yang menyebabkan pada akhirnya Program GERDU TASKIN menjadi tidak efektif. Kekurangan lain, dari berbagai program GERDU TASKIN adalah pada segi proses dan transparansinya. Ada kesan kuat akibat kurangnya proses persiapan, khususnya program-program JPS, menyebabkan tahap penting dalam Program GERDU TASKIN seperti keharusan untuk melakukan sosialisasi program menjadi kurang matang, dan pada akhirnya menyebabkan keterlibatan masyarakat untuk dapat ikut melakukan kontrol sosial menjadi lemah. Meski sulit untuk dikuantifisir, tetapi dalam banyak kasus acapkali ditemukan bahwa pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan rawan biasa dan bahkan rawan penyimpangan termasuk rawan kebocoran.

8. Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Problema kemiskinan di beberapa perkotaan sesungguhnya tidak terlalu berbeda dengan persoalan kemiskinan di pedesaan. Ciri-ciri yang menandai masyarakat miskin di kota umumnya adalah rentan, marginal, inferior, dan juga rawan diperlakukan salah. Rentan, karena mereka biasanya tidak memiliki penyangga ekonomi yang cukup, sehingga sangat mudah kehilangan aset produksi dan terjerat utang yang membuat mereka makin terpuruk. Marginal, karena mereka tersisih atau disisihkan dari kemungkinan untuk memberdayakan diri, baik dalam kehidupan sosial maupun kegiatan produktif. Dikatakan inferior, karena mereka biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap berbagai bentuk layanan dan fasilitas publik kota. Akses mereka terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, listrik dan sebagainya seringkali terhambat, dan bahkan tak jarang mereka harus membayar lebih mahal daripada tarif standar yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud rawan diperlakukan salah adalah mereka cenderung tidak berdaya, berpendidikan rendah, dan secara sosial terisolir, sehingga selain potensial menjadi obyek eksploitasi kelas ekonomi di atasnya, juga sering menjadi obyek penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun yang membedakan kemiskinan di kota dan di desa adalah pada *setting* sosial lingkungan kota yang lebih kompetitif, plural, tidak ramah, dan bersifat kontraktual. Berbeda dengan suasana di pedesaan di mana tekanan kemiskinan seringkali bisa dieliminasi oleh adanya mekanisme subsistensi, garansi sosial dari kerabat dan hubungan personal antar warga masyarakat di kota besar, kehidupan dan interaksi sosial warga satu dengan yang lain cenderung lebih individualistik, impersonal, dan komersial. Di kota besar, problema pengentasan kemiskinan relatif lebih rumit, sebab selain harus memprioritaskan pada warga masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh, kampung-kampung yang

padat, dan masyarakat daerah pinggiran kota yang acapkali menjadi korban suksesi pemilikan lahan akibat penetrasi modal kekuatan komersial, Pemkot tampaknya tidak dapat mengabaikan begitu saja kehadiran kaum migran yang dari waktu ke waktu tampak makin banyak jumlahnya.

Untuk mempertajam fokus program dan sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di kota, yang dibutuhkan tentunya bukan sekadar program yang sifatnya karitas atau bantuan-bantuan paket modal yang sifatnya parsial, tetapi yang dibutuhkan adalah langkah-langkah yang terpadu dan benar-benar fungsional dalam mendukung upaya pemberdayaan penduduk miskin itu sendiri, khususnya di kalangan keluarga yang secara sosial rentan, dari segi kesehatan rapuh, dan yang memiliki akses teramat kecil di bidang pendidikan. Dalam hal ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama dari pelaksanaan program-program pembangunan yang umumnya rawan bias dan a-historis diantaranya adalah: (a) Mempertajam fokus kelompok sasaran, (b) Menghindari kebijakan yang bersifat meritokratis, (c) Mengembangkan program perlindungan yang efektif bagi masyarakat miskin kota, (d) Mengembangkan efisiensi kegiatan produksi dan mendukung upaya diversifikasi usaha masyarakat miskin di kota, (e) Mengembangkan program intervensi yang lebih berorientasi pada pemberdayaan, dan (f) Melakukan program penanganan yang konsisten, (g) Pemberdayaan kontrol dan prakarsa lokal.

a. Mempertajam Fokus Kelompok Sasaran

Salah satu kelemahan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah pada persoalan konsistensi fokus kelompok sasaran. Selama ini, kebiasaan yang dilakukan adalah masing-masing dinas atau instansi menentukan sendiri-sendiri kelompok mana yang menjadi sasaran prioritas. BKKBN misalnya

memakai hasil pendataan tahapan keluarga sejahtera sebagai dasar penentuan kelompok sasaran. Sementara itu, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan biasanya tidak memakai mentah-mentah hasil pendataan BKKBN itu, tetapi mereka juga berusaha melakukan pendataan sendiri dengan pertimbangan fokus sasaran mereka agak berbeda. Selain pemborosan anggaran karena tiap-tiap instansi harus menyediakan tenaga, waktu dan dana sendiri-sendiri untuk keperluan pendataan awal kelompok sasaran, kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri ini acapkali menyebabkan dampak program menjadi parsial karena sifatnya tidak terpadu.

Untuk menghindari in-efisiensi dan kesamaan fokus kelompok sasaran, perlu dipikirkan langkah-langkah untuk melakukan pendataan kelompok sasaran dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai instansi. Dari segi sosial kita dapat memakai hasil pendataan keluarga sejahtera dari BKKBN, namun instrumen pendataan perlu ditambah dengan indikator lain dari segi pendidikan dan kesehatan. Jadi, kalau dirumuskan, keluarga miskin yang seharusnya diprioritaskan sebagai kelompok sasaran seyogyanya adalah keluarga Para-Sejahtera, tidak memiliki aset produksi yang layak khususnya adalah kelompok keluarga buruh industri kecil, buruh nelayan, buruh tani, dan buruh pabrik, serta pedagang kecil, memiliki anak yang putus sekolah atau anak yang bekerja, dan dari segi kesehatan anggota keluarga miskin tersebut termasuk kategori kurang gizi atau sering sakit.

Dengan mempertajam fokus kelompok sasaran ini, maka yang diharapkan adalah upaya-upaya pengentasan kemiskinan atau program pembangunan sektor sosial lain benar-benar dapat terarah, dan menjangkau lapisan masyarakat yang berada di level paling bawah : paling miskin di antara kelompok masyarakat miskin yang ada. Dikhawatirkan adalah bila fokus

kelompok sasaran tidak terfokus, maka biasanya program akan rawan bias, dan tidak mustahil jatuh kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak. Betapa pun, pengalaman bias dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program JPS seyogyanya menjadi pelajaran berharga yang tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang.

b. Menghindari Kebijakan Meritokratis

Sejak awal seyogyanya disadari bahwa persoalan kemiskinan dan kesejahteraan sosial penduduk bukanlah fenomena *single dimension* sebagai masalah kekurangan pendapatan atau modal berusaha saja, melainkan harus dipahami sebagai fenomena *multi dimension*. Kemiskinan di sini bukan sekadar persoalan kurangnya atau akses seseorang yang rendah terhadap lalu lintas uang dan barang. Tetapi, kemiskinan sesungguhnya juga terkait dengan empat dimensi yang lain, yaitu : kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi dan ketidakberdayaan atau yang disebut Robert Chambers (1987) dengan istilah *integrated poverty* atau perangkap kemiskinan.

Kerentanan menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakmampuan atau tidak dimilikinya tabungan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty rackets* atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin terpuruk di lembah kemiskinan. Sedangkan ketidakberdayaan umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan dan lemahnya posisi tawar-menawar keluarga miskin, baik dalam kegiatan perdagangan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebuah keluarga miskin yang masuk

dalam perangkat kemiskinan, niscaya mereka akan kesulitan mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki karena adanya tekanan-tekanan yang sifatnya struktural.

Untuk menjamin efektivitas sebuah kebijakan, bantuan atau program sosial apapun yang ditujukan kepada keluarga miskin harus benar-benar terfokus kepada keluarga miskin yang berada di lapis paling bawah, di saat yang sama pelaksanaan program tersebut harus dibarengi dengan upaya-upaya perlindungan yang memihak. Program pembangunan sektor sosial dalam bentuk apapun, entah bantuan modal usaha, bantuan teknologi atau proses pendampingan harus dapat merangsang perkembangan kegiatan produktif keluarga miskin, tidak mustahil akan bersifat *meritokratis* karena tidak didukung oleh kesiapan basis sosial massa secara merata. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin seorang pengusaha industri kecil konveksi misalnya, dapat bersaing dengan perusahaan garmen besar yang sudah memiliki aset lebih, baik dari segi modal, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Seperti dikatakan Vic George dan Paul Wilding (1992), kebijaksanaan yang berorientasi pertumbuhan dan hanya mengutamakan kesamaan kesempatan berkompetisi, secara konsepsional berlawanan dengan pendekatan pembangunan yang berdimensi kerakyatan, dan semakin kehilangan daya tariknya karena telah terkumpul banyak bukti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang egaliter ternyata telah membuahkan hasil yang tidak egaliter. Kedua ahli ini juga menyatakan bahwa kebijaksanaan yang terlalu menekankan unsur persamaan kesempatan saja cenderung bersifat *meritokratis*. Penekanan lebih ditujukan pada persamaan dalam bersaing daripada persamaan dalam hasil yang dicapai. Jadi, semacam turunan langsung dari individualisme yang dibalut dan

dimanusiawikan melalui usaha-usaha negara kesejahteraan atau merupakan hasil konstelasi nilai-nilai yang mencerminkan kompromi antara nilai *laissez-faire* dan persamaan.

c. Perlindungan yang Efektif Bagi Masyarakat Miskin Kota

Kemiskinan sesungguhnya terjadi bukan sekedar karena kelemahan mental, tidak dimilikinya etos wirausaha atau faktor-faktor internal dari orang miskin itu sendiri. Perlu disadari bahwa fenomena “lingkaran kemiskinan” bukanlah satu kawasan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan fenomena “kawasan berlebihan”. Banyak bukti menunjukkan, bahwa kemiskinan dan proses pemiskinan pada dasarnya justru terjadi sebagai akibat dari proses eksploitasi atau pengambilan hak secara kurang adil dari milik atau hak orang-orang miskin. Posisi tawar-menawar yang lemah, ketidakberdayaan dan tidak dimilikinya akses terhadap hukum dan perlindungan sosial yang memadai adalah faktor utama yang menyebabkan penduduk miskin seringkali mudah diperlakukan tidak adil atau menjadi sasaran dari perlakuan-perlakuan yang merugikan mereka.

Untuk memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin agar dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka secara adil, karena itu yang dibutuhkan adalah bentuk-bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang benar-benar nyata. Di tingkat makro, barangkali salah satu bentuk perlindungan yang dibutuhkan adalah perlu segera diimplementasikan UU Anti-Monopoli atau berbagai bentuk pembatasan lain yang dapat secara efektif mencegah kemungkinan terjadinya intervensi dari kekuatan komersial besar yang merugikan penduduk miskin. Penjaminan hak bagi rakyat atas tanah misalnya, adalah bentuk lain perlindungan sosial yang dibutuhkan penduduk miskin agar mereka tidak menjadi korban

penggusuran yang merugikan. Di samping itu, pada tingkat mikro layak pula dipikirkan cara-cara yang efektif untuk mencegah agar peran tengkulak atau tukang ijon tidak berdampak merugikan bagi penduduk miskin. Pendek kata, bagi keluarga miskin yang mereka butuhkan adalah jaminan agar mereka dapat memperoleh harga yang adil atas komoditi yang mereka hasilkan.

d. Berorientasi Pada Pemberdayaan

Program pembangunan seyogyanya tidak terjebak pada program-program yang sifatnya karitatif dan punitif melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang lebih berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan, menurut Indrasari Tjandraningsih (1996), mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi kerergantungan.

Menurut David C. Korten (1984), untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, karena itu yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar adalah sebuah kebijakan anti-kemiskinan yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Asumsi dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi berorientasi pada

potensi manusia. Melalui potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni : (1) memusatkan pemikiran pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas, (2) mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi, dan (3) mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran kepada individu bukan sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa, kearifan dan perbedaan lokal. Karena itu ia mendukung sistem-sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan komunitas-komunitas swadaya.

e. Efisiensi dan Diversifikasi Usaha

Kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Selama ini, banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengentasan kemiskinan di Indonesia memang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi

daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi seperti program motorisasi perikanan atau masuknya huller di desa-desa, misalnya yang diberikan pemerintah meskipun dimaksudkan untuk mendorong pendapatan masyarakat miskin. Namun, sangat kelihatan bahwa dibalik itu maksud yang sesungguhnya adalah untuk meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan peraihan devisa. Bahkan, yang lebih tragis sering terjadi tindakan yang dilakukan pemerintah atas nama pembangunan bukan memberikan manfaat yang nyata bagi usaha pengentasan kemiskinan, melainkan justru berdampak menggerogoti kemampuan swadaya lokal. Penetrasi teknologi dan bantuan modal usaha ke berbagai wilayah dan komunitas masyarakat miskin, di satu sisi telah berhasil mendorong angka-angka produksi dan mengantarkan Indonesia ke tahap swasembada dalam berbagai sektor produksi. Namun, tak bisa diingkari bahwa kesenjangan di saat yang bersamaan justru makin melebar dan potensi masyarakat banyak yang tersungkur digerus modernisasi.

Sebagai salah satu alternatif dan mungkin juga dapat dilakukan secara bersamaan adalah pola untuk mengembangkan usaha kecil dengan cara melakukan efisiensi proses produksi. Suatu unit kerja sektor industri kecil, misalnya, boleh-boleh saja tetap menjual hasil produksinya dalam jumlah yang sama setiap hari. Namun, yang kemudian harus dipikirkan adalah bagaimana menjadikan unit kerja tersebut dapat memetik keuntungan yang lebih besar dari kondisi sebelumnya. Dengan bantuan teknologi produksi, perbaikan manajemen diharapkan proses produksi dapat berlangsung lebih irit dan efisien, sehingga hasil akhir yang diperoleh dapat lebih besar.

Selain itu, untuk meningkatkan kadar keberdayaan keluarga miskin dan sekaligus mencegah resiko kemungkinan terjadinya kegagalan total dari

usaha keluarga miskin alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beraneka ragam atau satu dengan yang lain saling berbeda.

f. Program Penanganan yang Konsisten

Keinginan agar perkembangan suatu daerah atau wilayah makin sensitif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat miskin atau golongan marginal sebetulnya sudah tercantum dalam Renstra pembangunan pada masing-masing daerah atau wilayah. Tetapi, sering terjadi suatu daerah atau wilayah yang tumbuh karena dihela kekuatan industri dan semata hanya pro-modernitas, justru tumbuh tanpa perasaan, dan cenderung malah melakukan berbagai regulasi untuk membatasi ruang gerak masyarakat miskin. Seperti di Jakarta dan Surabaya, belakangan ini Pemkot tampaknya selalu mengembangkan sikap dan kebijakan yang sifatnya kontra terhadap kehadiran kaum migran dan masyarakat marginal kota yang berserakan di berbagai sudut kota. Dengan dalih bahwa kehadiran mereka menyebabkan kota menjadi semrawut dan kotor, maka ratusan personil diturunkan di tujuh jalur utama dengan tujuan menertibkan berbagai kelompok penyandang masalah sosial mulai dari PSK, anak jalanan, pengamen, PKL, tukang becak dan sebagainya.

Selama ini, ciri yang menandai perkembangan kota-kota di Negara Sedang Berkembang biasanya adalah berbagai bentuk kontradiksi, yakni polarisasi dan distorsi. Sering terjadi, dengan dalih demi ketertiban kota dan agar investor bersedia menanamkan modalnya, hak-hak masyarakat miskin di kota kemudian diabaikan, dan bahkan dengan berbagai alasan mereka seolah-olah diperlakukan seperti pendatang yang hanya menodai kebersihan dan kemajuan perkembangan kota itu sendiri. Pengusuran,

operasi penertiban, dan sejenisnya adalah fenomena sehari-hari yang dengan mudah kita jumpai di kota-kota besar.

g. Pemberdayaan Kontrol dan Prakarsa Lokal

Untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyelewengan program pembangunan, maka perlu dikedepankan keterlibatan lembaga-lembaga lokal untuk ikut melakukan kontrol atas pelaksanaan program di daerahnya. Dalam hal ini, beberapa bentuk program taktis yang barangkali perlu dilaksanakan adalah (1) pemasangan “papan reformasi” di tiap-tiap kelurahan sebagai media informasi alokasi dana dan rincian program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan, dan (2) pembentukan tim verifikasi di tiap-tiap kelurahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM dan ulama yang bertugas untuk memberikan keputusan terakhir dalam penentuan kelompok sasaran program, sekaligus berperan sebagai kelompok kontrol pelaksanaan program di luar mekanisme kelembagaan yang sudah ada.

B. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan perubahan tidak hanya di harapkan terjadi pada aspek fisik dan kelembagaan saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil, tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyedia-

kan jalan mulus dan jembatan yang kokoh atau membangun berbagai pusat pembelanjaan. Namun juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu (Soetrisno, 1995).

Selama proses transformasi yang dijalankan pada tahun-tahun terakhir, pembangunan ekonomi di satu sisi memang telah menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Tetapi, harus diakui bahwa kemajuan di bidang ekonomi yang termasuk spektakuler itu ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan masyarakat. Di kawasan Indonesia Timur termasuk kabupaten Donggala, ada sejumlah dilema yang harus dihadapi pemerintah dalam melaksanakan dan merencanakan program pembangunan. Sejumlah dilema pembangunan itu antara lain adalah: (1) dilema antar penduduk dan antar wilayah, (2) masalah pelayanan dasar, (3) pembangunan prasarana, (4) masalah kemiskinan, (5) masalah kualitas sumberdaya manusia, dan (6) masalah industri dan perdagangan.

Secara teoritis, salah satu faktor yang menjadi penyebab berbagai program pembangunan kurang memberikan hasil yang maksimal adalah bersumber pada masalah manajemen pembangunan yang kurang berjalan dengan baik, terutama di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program. Menurut Robert Chambers (1987), kenyataan kemiskinan dan kesenjangan masih merebak di berbagai negara sedang berkembang adalah karena para perencana pembangunan seringkali hanya bertindak seperti “turis pembangunan” dan bertindak sebagai

“orang luar” yang bersikap sok tahu, sehingga dalam banyak hal kurang empatif terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di wilayah. Di berbagai Negara, banyak bukti menunjukkan bahwa para perencana pembangunan cenderung dipenuhi dengan prasangka atau syakwasangka dan mereka terlalu percaya pada angka-angka statistik yang sesungguhnya kurang dapat dipercaya.

Persoalan yang dihadapi pemerintah sekarang, khususnya di kabupaten Donggala adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dapat mengurangi jumlah keluarga miskin. Secara teori menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan adalah diantaranya melalui peningkatan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, maka diperlukan peningkatan mutu sumberdaya insani, penyediaan alat-alat produksi yang memadai, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Diantara program yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan adalah menyusun peta kemiskinan. Peta kemiskinan yang dibuat akan berguna untuk akan dapat menangkap heterogenitas kemiskinan suatu daerah, memperbaiki penentuan sasaran intervensi, membantu pemerintah menjelaskan berbagai tujuan kebijakan, berperan penting dalam menyampaikan informasi mengenai distribusi kesejahteraan kepada masyarakat madani di suatu wilayah, dan dengan mudah mengevaluasi dampak berbagai program kemiskinan yang dilakukan.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka dikemukakan beberapa konsep operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial dan ekonomi. Basis kekuasaan sosial dan ekonomi dalam penelitian ini diukur berdasarkan kriteria (a) modal produktif atas asset; (b) sumber keuangan rumah tangga; (c) Sandang, berupa jumlah pakaian yang dibeli; (d) Pangan berupa fasilitas air bersih dan persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan; (e) Papan berupa kepemilikan rumah, jenis dinding, jenis lantai, sarana buang air besar, dan sumber penerangan; (f) Partisipasi sekolah; (g) Pelayanan kesehatan; (h) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan memadai; dan (i) informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.
2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan adalah berkurangnya keluarga yang miskin di Kabupaten Donggala sebagai akibat dari suksesnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah utamanya peningkatan pendapatan masyarakat. Pengurangan Tingkat Kemiskinan diantaranya dipengaruhi oleh peran perempuan dalam peningkatan kesempatan kerja dari seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Donggala.
3. Peningkatan kesempatan kerja adalah peningkatan peluang atau keberhasilan masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala untuk mendapatkan kesempatan kerja dari tahun ke tahun. Peningkatan kesempatan kerja diantaranya dipengaruhi oleh Peningkatan Mutu Sumberdaya Insani, Ketersediaan Alat Produktif, dan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi.
4. Peningkatan Mutu Sumberdaya Insani diukur berdasarkan indikator dari Job Training, Penyuluhan, Pemagangan, Pendampingan, dan Diklat Khusus.

5. Ketersediaan Alat Produksi diukur berdasarkan indikator dari Jenis Alat Produksi yang digunakan, Kapasitas Alat Produksi, Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Hibah dari perusahaan-perusahaan Negara kepada kelompok-kelompok produktif dari keuntungan yang dicapai.
6. Keterlibatan dalam aktivitas ekonomi diukur berdasarkan indikator dari kejelasan bidang usaha yang dijalankan, kepastian pasar, dukungan bantuan disain produk, kepastian sumber bahan, kemudahan perizinan Usaha, dan perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 10 kecamatan yang ada di kabupaten Donggala. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan Mei 2013.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari Rumah Tangga miskin, dan Tokoh Masyarakat. Rumah tangga miskin menurut skornya dikategorikan menjadi tiga, yaitu: rumah tangga yang dikategorikan mendekati miskin (*near poor*); rumah tangga miskin (*poor*); dan rumah tangga yang masuk kategori sangat miskin (*real poor*). Terhadap skor yang Kategori I (*near poor*) tidak dimasukkan ke dalam kategori miskin. Oleh karena itu yang dimaksud rumah tangga/penduduk miskin dalam penelitian ini adalah mencakup kategori *poor* dan *real poor*. Data primer terdiri dari:

1. Data untuk menentukan kriteria rumah tangga miskin, berupa data yang terkait dengan (a) modal produktif atas asset; (b) sumber

keuangan rumah tangga; (c) Sandang, berupa jumlah pakaian yang dibeli; (d) Pangan berupa fasilitas air bersih dan persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan; (e) Papan berupa kepemilikan rumah, jenis dinding, jenis lantai, jenis atap, sarana buang air besar, dan sumber penerangan; (f) Partisipasi sekolah; (g) Pelayanan kesehatan; (h) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan memadai; dan (i) informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

2. Data untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah keluarga miskin, yaitu berupa (a) Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani, (b) Ketersediaan Alat Penangkapan ikan, (c) Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi, dan Peningkatan Kesempatan Bekerja.

Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil publikasi atau laporan-laporan yang terkait dengan penelitian, yaitu berupa jumlah penduduk, jumlah dan persentase keluarga miskin, dan data sekunder lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk atau rumah tangga yang dikategorikan miskin dan memiliki usaha kecil mikro pada 10 kecamatan yang ada di kabupaten Donggala. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini, maka sampel dipilih secara random untuk setiap kecamatan diwakili oleh 1 desa, dan setiap desa dipilih lagi sebanyak 30 rumah tangga yang dikategorikan miskin. Dengan demikian, jumlah sampel untuk rumah tangga yang dikategorikan miskin pada 10 kecamatan adalah sebanyak 300 rumah tangga.

D. Indikator/Parameter Penelitian

Penelitian ini menggunakan 6 variabel, yaitu Peran Perempuan (PP), Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani (MSDI), Ketersediaan Alat Produksi, Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB), Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE), dan Variabel Pengurangan Tingkat Kemiskinan (PTKM).

E. Model Analisis

Model Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Model analisis ini memberikan penjelasan atau gambaran tentang peran perempuan dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat miskin di kabupaten Donggala. Analisis yang digunakan adalah Analisis Distribusi Frekuensi.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui dan menganalisis program-program atau variabel-variabel yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat atau penurunan jumlah keluarga miskin, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di kabupaten Donggala. Untuk penentuan strategi dan model pengentasan kemiskinan di kabupaten Donggala, maka dilakukan analisis SWOT seperti pada bagan atau table 2 berikut ini.

Tabel 2. Analisi SWOT

Eksternal Internal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Treats</i>)
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Strategi (S-O) Menggunakan Kekuatan Untuk Merebut Peluang	Strategi (S-T) Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Strategi (W-O) Meminimalkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi (W-T) Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dibagi dalam 5 tahap kegiatan yaitu: (1) kegiatan pengumpulan data, (2) kegiatan tabulasi data, (3) kegiatan analisis data, (4) kegiatan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian dan (5) perumusan kebijakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden

Pada laporan akhir penelitian ini, jumlah responden yang dijadikan sampel adalah sebanyak 300 orang yang berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala, dan setiap kecamatan dipilih 30 orang sebagai responden. Adapun 10 kecamatan yang menjadi obyek penelitian adalah Kecamatan Sojol, Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Labuan, Kecamatan Banawa, dan Kecamatan Tanantovea.

Untuk lebih jelasnya karakteristik responden, maka dapat dilihat pada lampiran 2 dan diuraikan seperti berikut ini.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan unit analisis penelitian adalah perempuan, maka jenis kelamin responden adalah 100% perempuan.

2. Umur

Produktivitas seseorang dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh umur. Secara umum, rata-rata umur responden perempuan pada rumah tangga

miskin masih berada pada kelompok usia produktif untuk bekerja. Artinya, secara fisik perempuan masih memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan barang dan jasa. Umur responden adalah berkisar antara 17 tahun hingga 67 tahun. Responden yang berumur 20 tahun atau kurang adalah sebanyak 8 orang (2,67%), responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 82 orang (27,33%), responden yang berumur 31 - 40 adalah sebanyak 129 orang (43%), responden yang berumur 41 - 50 tahun sebanyak 57 orang (19%), responden yang berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 14 orang (4,67%). Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh yang berumur antara 21 sampai dengan 50 tahun.

3. Suku

Di Kabupaten Donggala terdiri dari berbagai suku, yaitu suku Kaili, Makassar, Bugis, Dampelas, dan suku lainnya yang ada di Indonesia seperti Jawa, Bali, Lombok, Bou, Lauje, Gorontalo, Pamona, dan Tator. Sebahagian besar dari responden adalah berasal dari suku Kaili, yaitu sebanyak 159 orang (53%). Kemudian diikuti oleh suku Bugis sebanyak 74 orang (24,67%), suku Dampelas sebanyak 30 orang (10%), suku lainnya sebanyak 20 orang (6,67%), dan suku Makassar adalah sebanyak 17 responden atau sekitar 5,67%.

4. Agama

Sebahagian besar dari responden adalah beragama Islam, yaitu sekitar 239 orang (97,7%). Penganut agama Kresten sebanyak 2 orang (0,67%), dan penganut agama Hindu dan Budha sebanyak 5 orang (1,67%).

5. Status Perkawinan

Responden yang berstatus sudah kawin proporsinya lebih besar dibanding dengan yang belum kawin, dan janda. Jumlah responden yang sudah

kawin yaitu sebanyak 285 orang (95%), belum kawin sebanyak 6 orang (2%), dan berstatus janda sebanyak 9 orang (3%).

6. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan meningkatnya pendidikan maka seseorang akan dapat memperoleh pekerjaan dengan imbalan yang relatif tinggi. Pendidikan biasanya berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 40 orang (13,3%) dari responden adalah tidak pernah sekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sebanyak 119 orang (39,7%) dari responden adalah tamat Sekolah Dasar, sebanyak 97 orang (32,3%) yang tamat SLTP, sebanyak 38 orang (12,7%) yang tamat SLTA, dan sisanya sebanyak 6 orang (2%) yang tamat Diploma/sarjana.

7. Pekerjaan Pokok

Pekerjaan pokok sebahagian besar dari responden adalah berjualan, yaitu sebanyak 176 orang (58,7%), sebanyak 96 orang (32%) bekerja sebagai petani, sebanyak 7 orang (2,3%) bekerja sebagai buruh, sebanyak 10 orang (3,3%) bekerja sebagai nelayan, sebanyak 3 orang (1%) bekerja sebagai tukang jahit, dan sebanyak 8 orang (2,7%) bekerja pada usaha lainnya.

8. Jumlah Anak dan Tanggungan

Anggota keluarga dalam rumah tangga yang hidup pada satu dapur biasanya mempunyai hubungan yang dekat. Kondisi demikian ini terutama bagi istri yang biasanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangganya akan mempengaruhi situasi kerjanya. Jumlah tanggungan mempengaruhi tinggi rendahnya beban pekerjaan istri, baik dalam mencari nafkah maupun menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa jumlah anak dari responden berkisar hingga 8 orang. Responden yang tidak atau belum memiliki anak adalah sebanyak 10 orang (3,3%), responden yang jumlah anaknya ≤ 3 orang adalah sebanyak 194 orang (64,67%), yang berkisar antara 4 sampai 6 orang adalah sebanyak 86 orang (28,67%), dan lebih dari 6 orang sebanyak 10 orang (3,33%). Demikian pula halnya dengan jumlah tanggungan, dimana jumlah tanggungan dari responden berkisar hingga 8 orang. Responden yang jumlah tanggungannya ≤ 3 orang adalah sebanyak 67 orang (22,33%), dan jumlah tanggungan yang berkisar antara 4 sampai 6 orang adalah sebanyak 226 orang (75,33%), serta jumlah tanggungan lebih dari 6 orang adalah sebanyak 7 orang (2,33%).

9. Pendapatan

Pendapatan keluarga miskin merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh anggota rumah tangga yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan yang hidup dalam satu dapur yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan responden berkisar hingga lebih dari Rp. 1 juta per bulan, dimana responden yang berpendapatan $\leq$ Rp. 250.000,- adalah sebanyak 114 orang (38%) dan yang berpendapatan Rp. 250.001 – Rp. 500.000,- sebanyak 145 orang (48,3%), yang berpendapatan Rp. 500.000 – Rp. 750.000 adalah sebanyak 25 orang (8,3%), serta yang berpendapatan Rp. 1 juta atau lebih sebanyak 16 orang (5,33%). Ini berarti bahwa sebahagian besar dari responden pendapatannya dikategorikan masih rendah.

10. Frekwensi Makan Setiap Hari

Frekwensi makan responden setiap hari sebahagian besar adalah tiga kali dengan jumlah responden adalah sebanyak 206 orang (68,7%), dan yang

frekwensi makan dua kali sehari adalah sebanyak 91 orang (30,3%), serta yang frekwensi makan satu kali sehari adalah sebanyak 3 orang (1%).

11. Frekwensi Makan Daging/Ayam Dalam Seminggu

Sebahagian besar responden tidak pernah mengkonsumsi daging/ayam dalam seminggu, yaitu sebanyak 249 orang (83%). Jumlah responden yang mengkonsumsi daging/ayam satu kali seminggu adalah sebanyak 49 orang (16,3%), serta sebanyak 2 orang (0,7%) yang kadang-kadang mengkonsumsi daging/ayam dua kali seminggu.

12. Frekwensi Minum Susu Dalam Seminggu

Sebahagian besar dari responden tidak pernah minum susu dalam seminggu, yaitu sebanyak 259 orang (86,3%). Sedangkan yang kadang-kadang minum susu satu kali seminggu adalah hanya sebanyak 41 orang (13,7%).

13. Sumber Air Minum

Sumber air minum sebahagian besar dari responden adalah berasal dari sumur, yaitu sebanyak 153 orang (51%). Sedangkan sumber air minum yang berasal dari PAM adalah sebanyak 100 orang (33,3%), dan sebanyak 31 orang (10,3%) yang bersumber dari sungai, serta sebanyak 16 orang (5,3%) yang sumber air minumnya dari mata air yang tidak terlindung.

14. Frekwensi Beli Baju Baru Dalam Setahun

Sebanyak 224 orang (74,7%) dari responden penelitian yang mengatakan tidak pernah melakukan pembelian baju baru dalam setahun, dan sebanyak 76 orang (25,3%) yang mengatakan kadang-kadang melakukan pembelian baju baru untuk keluarganya sekali dalam setahun.

15. Pemakaian Bahan Bakar Untuk Memasak

Bahan bakar yang digunakan oleh responden untuk memasak umumnya adalah kayu bakar dan minyak tanah. Sebanyak 220 orang (73,3%) dari responden menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasak, dan sebanyak 76 orang (25,3%) yang menggunakan minyak tanah untuk memasak, serta selebihnya 4 orang (1,4%) menggunakan gas atau arang.

16. Status Kepemilikan Rumah

Berdasarkan status kepemilikan rumah, dapat dijealaskan bahwa sebahagian besar dari responden memiliki rumah sendiri, yaitu sebanyak 236 orang (78,7%). Sebanyak 3 orang (1%) diantaranya tidak atau belum memiliki rumah sendiri, sebanyak 20 orang (6,7%) yang tinggal di rumah kontrak, sebanyak 27 orang (9%) yang tinggal bersama saudara, dan sebanyak 14 orang (4,7%) yang masing tinggal bersama mertua.

17. Luas Bangunan Rumah

Luas bangunan rumah responden penelitian adalah sebagian besar berukuran lebih dari 8 m³ per orang, yaitu sebanyak 170 orang (56,7%), Sedangkan sebanyak 130 orang (43,3%) memiliki luas rumah kurang dari 8 m³ per orang.

18. Jenis Dinding Rumah

Pada umumnya jenis dinding rumah yang dijadikan responden penelitian di Kabupaten Donggala adalah berupa papan dan tembok murahan atau setengah tembok dan setengah papan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 111 orang (37%) dari responden memiliki dinding rumah dibuat dari papan, dan sebanyak 186 orang (62%) dari responden memiliki dinding rumah yang dibuat dengan tembok murahan, serta 3 orang (1%) dari responden yang dinding rumahnya terbuat dari gamaca.

19. Jenis Lantai Rumah

Jenis lantai rumah masyarakat yang dijadikan responden penelitian di Kabupaten Donggala adalah berupa lantai tanah, dan lantai dari semen biasa, tegel, serta lantai papan bagi rumah panggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 2 orang (0,7%) dari responden memiliki lantai rumah berupa tanah, sebanyak 259 orang (86,3%) dari responden memiliki lantai rumah yang dibuat dengan semen biasa, dan sebanyak 24 orang (8%) dari responden lantai rumahnya dibuat dari tegel, serta sebanyak 15 orang (5%) yang terbuat dari papan.

20. Jenis Atap Rumah

Jenis atap rumah masyarakat yang dijadikan responden penelitian di Kabupaten Donggala adalah berupa atap rumbia, atap genteng, dan atap seng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 21 orang (7%) dari responden menggunakan atap rumah dengan rumbia, sebanyak 1 orang (0,3%) dari responden menggunakan atap rumah dengan genteng dan sebanyak 278 orang (92,7%) dari responden menggunakan atap rumah dengan seng.

21. Fasilitas MCK

Sebahagian besar dari responden penelitian telah memiliki fasilitas MCK. Namun ada sebanyak 54 orang (18%) dari responden yang belum memiliki fasilitas MCK, sebanyak 77 orang (25,7%) dari mereka melakukan pembuangan air besar di sungai, pinggir laut, pinggir sawah/kebun, atau ditempat-tempat lain yang bukan dikategorikan MCK. Sedangkan yang memiliki fasilitas MCK adalah sebanyak 169 orang (56,3%).

22. Sumber Penerangan Rumah

Dengan memperhatikan sumber penerangan rumah, maka dapat dijealaskan bahwa responden yang tidak menggunakan listrik adalah

sebanyak 33 orang (11%), dan responden yang telah menggunakan listrik untuk penerangan rumahnya adalah sebanyak 267 orang (89%).

23. Tabungan dan Barang Yang Mudah Dijual

Sebahagian besar dari responden penelitian tidak memiliki tabungan jenis apapun dan juga tidak memiliki barang yang mudah dijual. Hal ini disebabkan karena kebutuhan hidup mereka setiap hari masih serba kekurangan. Responden yang tidak memiliki tabungan sebanyak 265 orang (88,3%), dan yang memiliki tabungan sebanyak 35 orang (11,7%). Demikian pula dengan responden tidak memiliki barang yang mudah dijual adalah sebanyak 189 orang (63%), dan memiliki tabungan adalah sebanyak 111 orang (37%).

24. Kemampuan Menyekolahkan Anak

Sebagian responden kurang mampu menyekolahkan anaknya, yaitu sebanyak 132 orang (44%), sebanyak 59 orang (19,7%) responden yang mengatakan tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, sebanyak 79 orang (26,3%) yang mengatakan cukup mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hanya sebanyak 30 orang (10%) yang mengatakan mampu untuk menyekolahkan anaknya.

25. Tingkat Pendidikan Anak

Secara rata-rata, dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan anak pada kelompok keluarga yang dijadikan responden di Kabupaten Donggala masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 97 orang (32,3%) responden yang mengatakan bahwa anaknya rata-rata tidak tamat SD dan bahkan tidak sekolah, sebanyak 122 orang (40,7%) yang mengatakan bahwa rata-rata anaknya tamat SD, sebanyak 57 orang (19%) yang tamat SLTP, dan sebanyak 24 orang (8%) yang mengatakan bahwa anaknya tamat SLTA.

26. Ketaatan Menjalankan Ajaran Agama

Hasil penelitian melalui pengisian kuesioner oleh responden menunjukkan bahwa sebanyak 1 orang (0,3%) yang mengatakan tidak taat dalam menjalankan ajaran agama, sebanyak 13 orang (4,3%) yang mengatakan kurang taat menjalankan ajaran agama, sebanyak 123 orang (41%) yang mengatakan cukup taat menjalankan ajaran agama, dan sebanyak 139 orang (46,3%) yang taat menjalankan ajaran agama, serta sebanyak 25 orang (8%) yang mengatakan sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya.

27. Kesanggupan Membiayai Pengobatan Keluarga

Sebahagian besar dari responden mengatakan bahwa mereka kurang bahkan tidak sanggup untuk membiayai pengobatan keluarganya jika sakit. Sebanyak 42 orang (14%) yang mengatakan tidak sanggup untuk membiayai pengobatan keluarganya jika sakit, sebanyak 140 orang (46,7%) yang mengatakan kurang sanggup untuk membiayai pengobatan keluarganya, dan sebanyak 85 orang (28,3%) yang mengatakan cukup sanggup untuk membiayai pengobatan keluarganya, serta sebanyak 33 orang (11%) yang mengatakan sanggup untuk membiayai pengobatan keluarganya jika sakit.

28. Tempat Pengobatan Keluarga

Pada umumnya responden penelitian memilih tempat pengobatan keluarganya pada Puskesmas, yaitu sebanyak 267 orang (89%). Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa sebanyak 21 orang (7%) yang mengatakan bahwa tempat pengobatan keluarganya adalah melalui dukun, dan sebanyak 4 orang (1,3%) yang mengatakan bahwa tempat pengobatan keluarganya adalah di Rumah Sakit, serta sebanyak 8 orang

(2,7%) yang mengatakan bahwa tempat pengobatan keluarganya adalah di Dokter praktek.

B. Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala

Pemberdayaan perempuan dihadapkan dengan sistem nilai di masyarakat mengenai perbedaan perempuan dan laki-laki yang berdampak terhadap distribusi kekuasaan sebagaimana berlaku di masyarakat. Sistem nilai yang memposisikan tugas utama perempuan sebagai istri di rumah tangga didukung oleh nilai yang dikembangkan melalui agama, kepercayaan dan kebijakan pemerintahan. Perempuan digambarkan mempunyai sifat halus, lembut, sabar, setia, dan pandai meredam gejolak. Hal ini selanjutnya direduksi dalam distribusi kekuasaan maupun akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang berperan penting dalam menentukan pendapatan. Perlu reorientasi pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan akar persoalan penyebab ketidakberdayaan perempuan dalam kemiskinan.

Pemberdayaan perempuan miskin di perdesaan dilakukan dalam rangka untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan agar perempuan secara aktif mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan dengan memperhatikan pemecahan issue tentang partisipasi perempuan dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan perdesaan telah melakukan banyak pekerjaan di ranah domestik maupun publik, namun perempuan perdesaan masih tetap terpinggirkan dalam menjangkau sumberdaya yang tersedia. Bahkan pembangunan yang telah dilakukan selama ini justru berdampak pada peminggiran terhadap perempuan dengan kebijakan pembangunan yang cenderung bias gender.

Bekerja sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan yang tidak selalu karena kekurangan pendapatan, tetapi pada rumah tangga miskin adalah sebuah keharusan bagi istri pada rumah tangga miskin yang dituntut agar dapat berperan ganda dalam rumah tangganya dengan mengalokasikan waktu sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena (1) masyarakat menyadari bahwa pendidikan sama pentingnya bagi kaum wanita agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan, dan (2) kemauan wanita untuk mandiri dan berusaha membiayai kebutuhan hidupnya, dan (3) mungkin juga membantu kebutuhan hidup anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya.

Untuk mengetahui alasan perempuan berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala, maka dapat dilihat pada tabel 3 dan diuraikan berikut ini.

Tabel 3. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin

No	Pernyataan	Frekuensi jawaban responden				
		1	2	3	4	5
1	Menambah Pendapatan Keluarga krn pendapatan suami relatif rendah	7 (2,3%)	7 (2,3%)	23 (7,7%)	231 (77,0%)	32 (10,7%)
2	Memanfaatkan berbagai keunggulan	3 (1,0%)	28 (9,3%)	20 (6,7%)	202 (67,3%)	47 (15,7%)
3	Menunjukkan eksistensi sebagai perempuan	2 (0,7%)	5 (1,7%)	12 (4,0%)	221 (73,7%)	60 (20,0%)
4	Ingin memiliki pendapatan sendiri	10 (3,3%)	23 (7,7%)	26 (8,7%)	187 (62,3%)	54 (18,0%)
5	Mendapatkan status atau kekuasaan	54 (18,0%)	110 (36,7%)	39 (13,0%)	86 (28,7%)	11 (3,7%)
6	Bekerja utk memperoleh pendapatan sangat mengganggu aktivitas internal rumah tangga	64 (22,7%)	154 (51,3%)	42 (14,0%)	33 (11,0%)	3 (1,0%)
7	Bekerja utk memperoleh pendapatan sangat mengganggu tanggungjawab terhadap keluarga	64 (21,3%)	159 (53,0%)	40 (13,3%)	35 (11,7%)	2 (0,7%)
8	Tanggungjawab keluarga	73	156	37	32	2

	mengganggu pekerjaan utk memperoleh pendapatan	(24,3%)	(52,0%)	(12,3%)	(10,7%)	(0,7%)
9	Dari pada trauma karena tinggal dalam rumah, maka lebih baik bekerja untuk memperoleh pendapatan	7 (2,3%)	24 (8,0%)	52 (17,3%)	172 (57,3%)	45 (15,0%)
10	Bekerja utk meningkatkan pendapatan supaya anak-anak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yg lebih tinggi	2 (0,7%)	6 (2,0%)	14 (4,7%)	227 (75,70%)	51 (17,0%)
11	Banyaknya anak yang dapat dimanfaatkan utk membantu perekonomian keluarga dalam menghasilkan pendapatan	21 (7,0%)	49 (16,3%)	45 (15,0%)	163 (54,3%)	22 (7,3%)
12	Keterbatasan perempuan dalam bekerja utk meningkatkan pendapatan keluarga karena terbatasnya akses perempuan dalam program kredit	12 (4,0%)	50 (16,7%)	64 (21,3%)	160 (53,3%)	14 (4,7%)
13	Keterbatasan perempuan dalam bekerja utk meningkatkan pendapatan keluarga karena terbatasnya informasi pasar atau bisnis	9 (3,0%)	58 (19,3%)	67 (22,3%)	150 (50,0%)	16 (5,3%)
14	Keterbatasan perempuan dalam bekerja utk meningkatkan pendapatan keluarga karena terbatasnya imanajemen dan pengembangan usaha	6 (2,0%)	42 (14,0%)	68 (22,7%)	164 (54,7%)	20 (6,7%)
15	Keterbatasan perempuan dalam bekerja utk meningkatkan pendapatan keluarga karena terbatasnya keterampilan dan pendidikan utk memperoleh peluang dan kesempatan kerja yang lebih baik	7 (2,3%)	31 (10,3%)	57 (19,0%)	178 (59,3%)	27 (9,0%)
16	Keterbatasan perempuan dalam bekerja utk meningkatkan pendapatan keluarga karena kurangnya kreasi sehingga hasilnya tidak pernah memuaskan	8 (2,7%)	52 (17,3%)	55 (18,3%)	163 (54,3%)	22 (7,3%)
17	Keterbatasan perempuan dalam bekerja utk meningkatkan pendapatan keluarga karena hanya sekedar ikut-ikutan dengan perempuan lain	44 (14,7%)	96 (32,0%)	77 (25,7%)	70 (23,3%)	13 (4,3%)

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, tahun 2013

Tabel 3 memperlihatkan peranan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sekitar lebih dari 80% dari kaum perempuan yang dijadikan responden di Kabupaten Donggala mengatakan mereka bekerja atau melakukan aktivitas selain sebagai ibu rumah tangga dengan alasan, karena (a) ingin menambah pendapatan keluarga karena pendapatan suami relatif rendah; (b) ingin memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimiliki berupa pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan pendapatan; (c) ingin menunjukkan eksistensi sebagai perempuan yang mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga; (d) ingin memiliki pendapatan sendiri; dan (e) ingin mendapatkan status atau kekuasaan lebih besar didalam kehidupan keluarga.
2. Kaum perempuan di Kabupaten Donggala dalam melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan tidak mengganggu aktivitas internal rumah tangga dan tanggungjawabnya terhadap kepentingan keluarga, dan sebaliknya tanggungjawab terhadap keluarga tidak mengganggu pekerjaan untuk memperoleh pendapatan. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan responden bahwa sekitar 64% dari mereka yang mengatakan bahwa bekerja untuk memperoleh pendapatan tidak mengganggu aktivitas internal rumah tangga dan tanggungjawabnya terhadap kepentingan keluarga, dan sebanyak 73% dari responden yang mengatakan bahwa tanggungjawab terhadap keluarga tidak mengganggu pekerjaan untuk memperoleh pendapatan.
3. Sekitar 72,3% dari responden yang mengatakan bahwa dari pada trauma karena tinggal dalam rumah, maka lebih baik bekerja untuk memperoleh pendapatan.

4. Sebanyak 92,7% kaum perempuan di Kabupaten Donggala sebagai responden mengatakan bahwa mereka harus bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena tidak mau membiarkan anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan sebanyak 61,6% mengatakan bahwa anak-anak mereka dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga dalam menghasilkan pendapatan.
5. Sebahagian besar dari responden atau kaum perempuan di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa keterbatasan mereka dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena (a) terbatasnya akses dalam program kredit (58%); (b) terbatasnya informasi pasar atau bisnis (55,3%); (c) terbatasnya manajemen dan pengembangan usaha (61,4%); terbatasnya keterampilan dan pendidikan (68,3%), dan kurangnya kreasi sehingga hasilnya tidak pernah memuaskan (61,6%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pula bahwa kaum perempuan yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarganya memiliki dampak yang positif dan negatif. Sebahagian besar dari responden mengatakan bahwa mereka yang bekerja untuk menambah peningkatan pendapatan keluarga tidak memiliki dampak negatif dalam kehidupan keluarganya, walaupun sekitar 7% dari responden yang mengatakan bahwa dampak negatifnya adalah berupa keluarga tidak terurus.

C. Strategi Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala

Untuk mengetahui model dan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala, maka

digunakan analisis SWOT. Dengan Analisis SWOT ini, akan diketahui pula faktor pendorong dan penghambat program pengentasan kemiskinan di kabupaten Donggala. Untuk lebih jelasnya analisis SWOT, dapat dilihat pada analisis berikut ini.

Langkah I : Analisis SWOT

Berdasarkan hasil tabulasi seperti pada lampiran 2, maka dapat diklasifikasi beberapa faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengambilan tindakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang ada di Kabupaten Donggala maka proses analisis seperti berikut ini.

a. Program Peningkatan Kesempatan Dalam Bekerja (PKB)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan bekerja bagi keluarga miskin di Kabupaten Donggala sudah cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena sebahagian besar dari keluarga miskin sudah memiliki keterampilan dasar dan memiliki pengalaman bekerja mandiri di sektor informal. Hal ini terbukti (Lampiran 2) bahwa sebanyak 90% dari responden telah menekuni pekerjaan atau bidang usahanya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, dan sebanyak 55,7% memiliki pengalaman bekerja mandiri di sektor informal.

Tabel 4. Faktor – Faktor kunci Keberhasilan Program Peningkatan Kesempatan Dalam Bekerja (PKB)

NO	FAKTOR INTERNAL		
Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)	
S.1	Terdapat 55,7 % keluarga miskin memiliki pengalaman bekerja mandiri disektor informal.	W.1	Keluarga miskin rata-rata pendidikannya masih rendah, yaitu sebanyak 53% tingkat pendidikan tidak tamat atau hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan 32,3% tamat SLTP.
S.2	Umumnya keluarga miskin Telah memiliki Keterampilan dasar dalam jenis Usaha yang dijalankannya (90%)	W.2	Wadah untuk pemberdayaan diri, baik dalam kehidupan sosial maupun kegiatan produktif belum mendukung.
S.3	86,30% umur keluarga miskin antara (17-45) Tahun	W.3	60,7% keluarga miskin tidak/kurang sanggup membiayai pengobatan keluarga
FAKTOR EKSTERNAL			
Opportunities (Peluang)		Threats (Ancaman)	
O.1	Akses transportasi darat antar daerah / propinsi lancar	T.1	Tuntutan kompetensi dipasar kerja makin tinggi
O.2	Industri sektor riil terus berkembang	T.2	Pemanfaatan teknologi mutakhir dalam teknologi pengolahan makin diminati industri.
O.3	Adanya program dana hibah dari pemerintah maupun LSM	T.3	Prasyarat perolehan dana hibah makin ketat

b. Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani (MSDI)

Keluarga miskin yang ada di Kabupaten Donggala pada umumnya memiliki sumber daya insani yang rendah. Hal tersebut disebabkan karena sebahagian besar dari keluarga miskin kurang atau tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, penyuluhan, pemagangan, dan pendampingan. Pada Lampiran 2 membuktikan bahwa sebanyak 66,6% responden

mengatakan kurang atau tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, sebanyak 65,7% kurang atau tidak pernah mengikuti penyuluhan, sebanyak 68% kurang atau tidak pernah ikut pemagangan, dan sebanyak 61,7% kurang atau tidak pernah mengikuti pendampingan.

Tabel 5. Faktor – Faktor kunci Keberhasilan Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani (MSDI)

No	FAKTOR INTERNAL		
	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	
S.1	Telah ada lembaga Amil Zakat	W.1	Tingkat pendidikan keluarga miskin masih rendah, yaitu sebanyak 85,5% sampai dengan tamat SLTP.
S.2	Pemerintah daerah memiliki Balai latihan kerja	W.2	Pengalaman terhadap pelatihan, penyuluhan, pemagangan, dan pendampingan rendah, yaitu kurang lebih 65%.
S.3	Keluarga miskin umumnya Telah memiliki Keterampilan dasar dalam jenis Usaha yang dijalankan	W.3	63,7 % keluarga miskin tidak/kurang mampu menyekolahkan anak
No	FAKTOR EKSTERNAL		
	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)	
O.1	Sumber Dana Langsung (SIZ) tersedia	T.1	Biaya pendidikan dan pelatihan terus meningkat
O.2	Adanya kebijakan pemberian kredit untuk pengembangan usah mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM)	T.2	Biaya hidup terus meningkat
O3	Teknologi pertanian dan perikanan terus berkembang	T.3	

c. Ketersediaan Alat Produksi (KATI)

Dengan memperhatikan ketersediaan alat produksi, maka dapat dijelaskan bahwa keluarga miskin yang dijadikan responden pada umumnya kurang atau tidak tersedia alat-alat produksi untuk mendukung

usahanya. Hal tersebut dibuktikan oleh sebanyak 57,3%% dari keluarga miskin yang kurang atau tidak memiliki jenis alat produksi, sebanyak 56,3% dari keluarga miskin yang mengatakan kurang atau tidak memiliki kapasitas alat produksi, sebanyak 52,3% yang mengatakan kurang atau tidak ada modal kerja untuk pengembangan usaha, dan sebanyak 58% yang mengatakan kurang atau tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk kredit investasi.

Tabel 6. Faktor – Faktor kunci Keberhasilan Program Ketersediaan Alat Produksi (KATI)

No	FAKTOR INTERNAL		
	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	
S.1	Keluarga miskin umumnya memiliki alat produksi dalam mengelola bidang usaha yang mereka tekuni.	W.1	Alat produksi tersedia dalam kapasitas terbatas
S.2	Keluarga miskin umumnya memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan alat produksi yang dimilikinya	W.2	Modal investasi dan modal kerja terbatas
S.3	Keluarga miskin memiliki potensi untuk memperoleh dana hibah	W.3	Akses ke sumber dana hibah lemah
No	FAKTOR EKSTERNAL		
	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)	
O.1	Industri produk instan terus berkembang	T.1	Harga alat produksi terus meningkat.
O.2	Lembaga keuangan pemerintah maupun swasta terbuka dalam memberikan kredit investasi dan modal kerja.	T.2	Tuntutan prasyarat kredit dari lembaga keuangan makin ketat.
O3	Program dana hibah dari pemerintah maupun LSM tersedia	T.3	Prasyarat perolehan dana hibah makin ketat

d. Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang usaha yang mereka tekuni selama ini (1) memiliki kejelasan prospek, kepastian pasar, dan kepastian sumber bahan baku di masa yang akan datang, (2) memerlukan dukungan desain, dan (3) sering mendapatkan keringanan dalam hal pembayaran pajak dan retribusi, serta kemudahan dalam memperoleh izin usaha.

Tabel 7. Faktor – Faktor kunci Keberhasilan Program Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE)

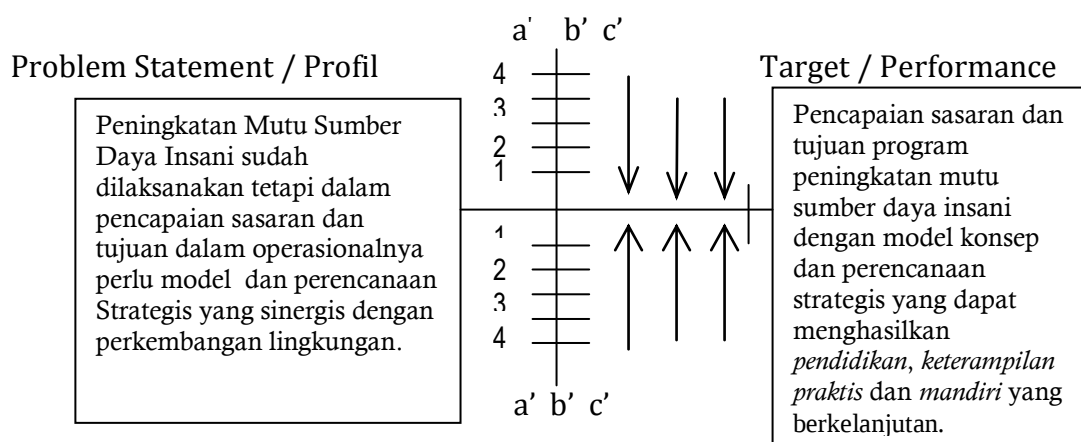
No	FAKTOR INTERNAL		
	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	
S.1	Masyarakat miskin umumnya memiliki pekerjaan pokok	W.1	Terdapat 86,3% dari keluarga miskin memperoleh pendapatan ≤ Rp.250.000,- perbulan
S.2	Bidang usaha yang dijalankan memiliki prospek pasar yang jelas	W.2	Aksesibilitas dan informasi pasar lemah.
S.3	Luas lahan garapan keluarga miskin sebagai petani ≥ 0,5ha.	W.3	Dukungan pemahaman terhadap sistem produksi/pengelolaan hasil masih lemah.
No	FAKTOR EKSTERNAL		
	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)	
O.1	Cyber Marketing makin diminati.	T.1	Selektivitas dan standarisasi hasil produksi yang diinginkan pasar makin tinggi.
O.2	Teknologi perikanan terus berkembang	T.2	Penyakit tanaman makin bervariasi
O.3	Komoditi Substitusi makin diminati	T.3	Biaya bahan pendukung usaha terus meningkat

Tabel 8. Matriks Korelatif Faktor-Faktor Eksternal dan Internal

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (w)
	1. Dengan adanya lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dimanfaatkan untuk mem-peroleh Sumber Dana Langsung dari masyarakat (SIZ)	1. Teknologi pertanian dan perikanan semakin terus berkembang, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan 85,3% keluarga miskin tingkat pendidikannya masih rendah.
Peluang (O)	Problem Statement Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani sudah dilaksanakan tetapi dalam pencapaian sasaran dan tujuan dalam operasionalnya perlu model dan perencanaan Strategis yang sinergis dengan perkembangan lingkungan.	
Ancaman (T)	1. Biaya pendidikan dan pelatihan semakin terus meningkat, dan dapat diatasi oleh Pemerintah daerah karena memiliki Balai latihan kerja	1. Biaya pendidikan dan pelatihan terus meningkat telah berdampak terhadap 63,7% keluarga miskin yang tidak/kurang mampu menyekolahkan anaknya.

Langkah II. Forcefield Analysis (Analisis Medan Kekuatan)

Problem Statement yang berhasil diidentifikasi merupakan profil (Status Quo). Saat ini yang merupakan akar masalah yang perlu ditreatment untuk mencapai proformance (target) yang akan datang, untuk keperluan tersebut digunakan analisis medan kekuatan sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat**Faktor-Faktor Pendorong****Tabel 9. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong**

No .	Faktor Penghambat		No	Faktor Pendorong	
	Uraian	Score		Uraian	Score
a'	Model pengelolaan sadagah, Infag dan Zakat (SIZ) dikelola secara konvensional.	4	a.	Telah ada lembaga Amil Zakat	4
b'	Biaya pendidikan dan pelatihan terus meningkat	3	b.	Tersedia Balai latihan Kerja .	4
c'	Tingkat pendidikan keluarga miskin masih rendah, yaitu sebanyak 85,5% sampai dengan tamat SLTP.	3	c.	Teknologi pertanian dan perikanan terus berkembang	4

Langkah III : Alternatif Solusi

Proses selanjutnya adalah menemukan alternatif solusi yang dapat melemahkan faktor penghambat dan atau memperkuat pendorong. Alternatif ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Matriks Alternatif Solusi

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat			Perlemah Perhambat
	a'	b'	c'	Alternatif Solusi
a	Tersedia Dana langsung SIZ dan data base masyarakat miskin secara akurat dan tepat waktu	←		Pengembangan model pengelolaan SIZ berbasis teknologi informasi.
b	↑	Persentase masyarakat miskin tidak mampu menyekolakan anak menurun	←	Pengembangan program pendidikan murah/gratis.
c		↑	Masyarakat miskin memiliki sikap interpreneur ship.	Meningkatkan keterampilan masyarakat miskin melalui Training/ diklat khusus
Perkuat Pendorong Alternatif Solusi	Melengkapi sarana dan prasarana pendungkun g Lembaga Amil Zakat.	Reorganisasi BLK manjadi pusat pengembanga n keterampilan dengan keterpakaian yang terpadu	Menyiapkan balai pusat latihan kerterampilana n kerja dan teknologi (BAPTEK)	

Langkah IV. Rencana Pengembangan

Tabel 11. Matriks Rencana Pengembangan Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani (MSDI)

Target	Faktor Penghambat / Pendorong	Problem Inditification	Alternatif Solusi	Aktivitas
1 Tersedia Dana langsung SIZ dan data base keluarga miskin secara akurat dan tepat waktu	1. Model pengelolaan sadagah, Infag dan Zakat (SIZ) dikelola secara konvensional. 2. Telah ada lembaga Amil Zakat	Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani sudah dilak-sanakan, tetapi dalam pencapaian sasaran dan tujuan dalam operasionalnya perlu model dan perencanaan Strategis yang sinergis dengan perkembangan lingkungan.	1. Pengembangan model pengelolaan SIZ berbasis teknologi informasi 2. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung Lembaga Amil Zakat.	1. Mengadakan pemetaan potensi masyarakat muslim dan masyarakat miskin . 2. Membangun sistem informasi manajemen administrasi pengelolaan SIZ.
2 Persentase masyarakat miskin tidak mampu menyekolakan anak menurun	1. Biaya pendidikan dan pelatihan terus meningkat. 2. Tersedia Balai latihan Kerja .		1. Pengembangan program pendidikan murah/gratis 2. Reorganisasi BLK menjadi pusat pengembangan keterampilan dengan keterpakaian yang terpadu	1. Penyiapan alokasi anggaran pengembangan program pendidikan 2. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
3 Masyarakat miskin memiliki sikap inter-preunership.	1. 85,5% keluarga miskin tidak tamat Sekolah Dasar dan hanya tamat SLTP 2. Teknologi pertanian dan perikanan terus berkembang		1. 1.Meningkatkan keterampilan masyarakat miskin melalui Training/diklat khusus 2. Menyiapkan balai pusat latihan keterampilan kerja dan teknologi (BAPTEK)	1. Menyiapkan prasarana dan sarana pendukung aktifitas program 2. Menyusun organisasi dan manajemen pengelolaan berbasis potensi masyarakat miskin serta program terpadu dengan lingkungan

Tabel 12. Matriks Rencana Pengembangan Ketersediaan Alat Produksi (KAPS)

Target	Faktor Penghambat / Pendorong	Problem Indivication	Alternatif Solusi	Aktivitas
1. Tersedia alat produksi dengan kapasitas yang cukup.	1. Alat produksi tersedia dalam kapasitas terbatas. 2. Masyarakat miskin umumnya memiliki Alat produksi	Umumnya Masyarakat miskin telah memiliki Alat Produksi tetapi tersedia dengan kapasitas dan dukungan modal yang terbatas	1. Menyiapkan program bantuan pengembangan kapasitas alat produksi. 2. Memanfaatkan produk teknologi tepat guna	1. Menyusun dan melakukan pemetaan sektor usaha produktif masyarakat miskin 2. Mengundang PT/Produsen TTG melakukan ekspose dan kejasama pengembangan alat produksi.

2.	Tersedia dukungan modal yang cukup.	1. Modal investasi dan modal kerja terbatas 2. Hasil produksi usaha masyarakat miskin memiliki pasar potensial.		1. Menetapkan lokasi kawasan teknologi binaan 2. Meningkatkan frekuensi informasi pasar hasil – hasil produksi	1. Melakukan pemetaan wilayah untuk kawasan teknologi binaan. 2. Membangun pusat informasi berbasis teknologi informasi.
3.	Skala pemasaran hasil produksi meluas (nasional-internasional)	1. Akses kesumber dana hibah lemah 2. Masyarakat miskin Potensial memperoleh dana hibah		1. Peningkatan akses kesumber dana blockgrant/hibah 2. Pengembangan sistem Cyber marketing berbasis ICT	1. Pengadaan sarana prasarana pendukung akses (Internet) 2. Pengadaan WEB potensi hasil – hasil produksi masyarakat

Tabel 13. Matriks Rencana Pengembangan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE)

Target	Faktor Penghambat / Pendorong	Problem Indivication	Alternatif Solusi	Activitas
1. Potensi usaha keluarga miskin meningkat	1.Terdapat 86,3% keluarga miskin memperoleh pendapatan ≤ Rp.250.000,- perbulan 2. Masyarakat miskin umumnya memiliki pekerjaan pokok	Keterlibatan Dalam Akti- vitas Ekonomi (KAE) sudah terlaksana tetapi dalam pengembangan usaha belum didukung modal usaha yang cukup dan akses pasar yang luas.	1. Pengembangan program bantuan modal kerja sektor usaha produktif. 2. pengalokasian anggaran kesektor produktif	1.Menyusun dan melakukan pemetaan sektor usaha produktif keluarga miskin 2.Menyusun Term of reference (TOR) anggaran bantuan sektor produktif.
2. Akses dalam aktifitas ekonomi meningkat .	1. Bidang usaha yang dijalankan memiliki pasar yang jelas 2. Aksesibilitas dan informasi pasar lemah..		1.Membangun pusat informasi pasar berbasis teknologi informasi.	1. Mengefektifkan peran penyuluh & pendamping lapangan 2. Menyusun data base potensi hasil – hasil produksi dan pusat informasi pasar.
3. Kemampuan untuk maju dan mandiri meningkat.	1. Dukungan pemahaman sistem produksi / pengolahan lemah 2. Luas lahan garapan Keluarga miskin ≤ 0,5ha, 26,8 % sebagai buruh tani.		1. Peningkatan kemampuan / keterampilan dalam mengelolah usaha 2. Menyiapkan bantuan modal usaha proporsional, dengan kajian tepat guna. 3. Menetapkan standar dan kriteria keterampilan.	1. Mengadakan panduan penyusunan proposal bantuan modal usaha. 2. Menyusun indikator/kriteria kelayakan kemampuan mengelola usaha. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan

Tabel 14. Matriks Rencana Pengembangan Peningkatan kesempatan bekerja (PKB)

Target	Faktor penghambat / Pendorong	Problem Indivication	Alternatif Solusi	Activitas
1. Keluarga miskin aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan produktif.	1. Terdapat 55,7% keluarga miskin memiliki pengalaman bekerja mandiri disektor informal.	Peningkatan kesempatan bekerja(PKB) telah diupayakan pemerintah daerah namun belum tercipta peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	1. Pengembangan program pertumbuhan ekonomi baru, prioritas keluarga miskin RENTAN (tidak memiliki penyangga ekonomi yang cukup).	1. Menyusun dan melakukan pemetaan wilayah strategis pengembangan usaha 2. Menyusun Term of reference (TOR) anggaran bantuan modal usaha masyarakat RENTAN.
2. Tersedia dukungan modal yang cukup.	1. Wadah untuk pemberdayaan diri, baik dalam kehidupan social maupun kegiatan produktif belum pendukung. 2. Umumnya masyarakat miskin Telah memiliki 3. Keterampilan dasar dalam jenis Usaha yang dijalankannya		1. Mengoptimalkan potensi swakarsa lokal 2. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan industri dalam upaya pengurangan masyarakat miskin.	1. Mengaktifkan peran organisasi sosial masyarakat desa 2. Menarik minat investor untuk memberikan bantuan modal dengan model binaan 3. Menyiapkan lokasi strategis dan layak untuk pengembangan usaha

Dengan memperhatikan Analisis SWOT di atas, maka dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat terlaksananya secara efektif peningkatan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala adalah:

1. Ditinjau dari aspek peningkatan mutu sumber daya insani, bahwa (a) Model pengelolaan sadagah, Infag dan Zakat (SIZ) dikelola secara konvensional, (b) biaya pendidikan dan pelatihan, serta (c) biaya hidup keluarga miskin terus meningkat.
2. Ditinjau dari aspek ketersediaan alat produksi, bahwa (a) Modal investasi dan modal kerja yang terbatas, (b) harga alat produksi yang semakin meningkat, (c) tuntutan prasyarat kredit dari lembaga keuangan makin ketat, dan (d) prasyarat perolehan dana hibah juga makin ketat.

3. Ditinjau dari aspek keterlibatan masyarakat miskin dalam aktivitas ekonomi, bahwa (a) bidang usaha yang dijalankan memiliki peluang pasar yang tidak jelas, (b) selektivitas dan standardisasi bahan baku atau produk yang diinginkan pasar semakin tinggi, dan (c) biaya bahan pendukung usaha terus meningkat.
4. Ditinjau dari aspek kesempatan bekerja, bahwa (a) wadah untuk pemberdayaan diri keluarga miskin baik dalam kehidupan sosial maupun kegiatan produktif belum mendukung, (b) tuntutan kompetensi di pasar kerja makin tinggi, dan (c) pemanfaatan teknologi mutakhir dalam teknologi pengolahan makin diminati industri.

Beberapa program yang terkait dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Donggala dengan berbagai upaya, akan tetapi untuk mencapai sasaran dan tujuan terhadap:

1. Peningkatan mutu sumber daya insani, maka dalam operasionalnya perlu model dan perencanaan strategis yang sinergis dengan perkembangan lingkungan.
2. Ketersediaan alat produksi untuk mendukung kegiatan usaha, maka diperlukan dukungan modal yang memadai karena selama ini umumnya keluarga miskin telah memiliki alat produksi tersebut, tetapi tersedia dengan kapasitas yang terbatas.
3. Keterlibatan keluarga miskin dalam aktivitas ekonomi, maka dalam pengembangan usaha perlu dukungan modal usaha yang cukup dan akses pasar yang luas.
4. Peningkatan kesempatan bekerja, keluarga miskin belum tercipta peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Hasil survey menemukan bahwa peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI) akan berakibat pada pergeseran profesi atau pekerjaan keluarga miskin, dari sektor informal ke formal, dan dari sektor pertanian tradisional ke

pertanian modern. Misalnya di perkotaan, dengan adanya peningkatan keterampilan melalui kegiatan diklat, maka mereka memiliki kesempatan untuk beralih dari buruh kasar menjadi pekerja pabrik atau sektor bisnis lainnya. Di pedesaan, dengan tambahan pengetahuan yang baru, khususnya mengenai pengolahan hasil pertanian primer, akan memberikan kesempatan kepada para petani untuk menjual hasil panennya setelah diolah (ditingkatkan nilai tambahnya).

Pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan keluarga miskin secara berkesinambungan diharapkan mencapai tujuan, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui pergeseran kehidupan anak-anak keluarga miskin ke sektor formal. Tujuan memutus rantai kemiskinan ini diusahakan perwujudannya melalui aktivitas penyediaan layanan pendidikan gratis dan bermutu kepada anak-anak miskin serta kegiatan penerangan melalui RRI dan koran lokal, tentang motivasi mencapai masa depan yang lebih baik melalui kerja keras. Anak-anak keluarga miskin yang telah selesai mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, setelah tamat SLTP, sekalipun lanjut ke SLTA, diberikan pelajaran ekstra tentang keterampilan. Latihan keterampilan ini, misalnya: cara membuat telur asin, memelihara lebah madu, tukang kayu, tukang batu, tukang tambal ban, menjahit, membuat manisan buah, dan sebagainya.

Anak-anak miskin yang telah selesai mengikuti pendidikan ekstra keterampilan terapan itu diarahkan untuk bekerja mandiri dengan membekalinya alat-alat kerja yang diperlukan serta modal kerja secukupnya yang bersumber dari fasilitas kredit mikro, kredit bergulir, dana taskin, dan sebagainya. Pendamping dan Penyuluh Lapangan bertugas untuk membimbing mereka, bagaimana mengelola usaha itu dengan baik, serta bagaimana membukukan transaksi, sekaligus mengatur pengembalian

kredit. Melalui cara ini, rantai kemiskinan melalui keturunan akan dapat diputuskan.

Dana-dana Raskin, BLT, dan dana pengentasan kemiskinan lainnya, sebaiknya dialihkan penggunaannya ke program ini. Apabila program ini berhasil, maka anak-anak keluarga miskin dengan sendirinya akan dapat membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala tidak cukup hanya menangani dan mengatasi persoalan ekonomi mereka, tetapi juga persoalan non-ekonomi keluarga miskin. Program ini bertujuan mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin. Untuk itu, dalam usaha mencapai masyarakat madani yang seimbang dan sejahtera, disusun rancangan strategi berikut:

1. Mewujudkan keluarga yang berkeseimbangan aspek material dan spiritualnya. Layanan perbaikan aspek spiritual ditangani melalui layanan pendidikan, layanan pemeliharaan kesehatan, layanan informasi melalui rubrik khusus di RRI dan koran lokal.
2. Mewujudkan keluarga yang sadar akan masa depan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Untuk menopang program ini, maka dilingkungan mereka harus disediakan sarana rumah ibadah, seperti mushollah. Mushollah ini selain sebagai tempat beribadah, juga dipakai sebagai tempat penyuluhan, Taman Pendidikan Al Quran (TPA) kepada anak-anak keluarga miskin. Penyediaan bahan pelajaran (Buku TPA) dan guru dibebankan pada anggaran Pemkab/Pemkot atau instansi terkait.
3. Mewujudkan keluarga yang sadar akan perawatan lingkungan hidup. Mereka melalui penyuluhan, ceramah agama dan program motivasi lainnya, dibekali pengetahuan perlunya memelihara kebersihan

lingkungan, serta pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup demi melestarikan sumber daya alam yang dimiliki. Apabila Pemkab memiliki program reboisasi atau penghijauan lingkungan, maka mereka dianjurkan ikut berpartisipasi sebagai tenaga kerja reboisasi dan penghijauan.

Dengan demikian, Rumusan Program Induk yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Donggala, diantaranya mencakup :

1. Peningkatan mutu sumber daya insani keluarga miskin dengan sub program :

- a. Menyelenggarakan job-training (latihan kerja), guna membekali mereka keterampilan kerja khas untuk dapat melaksanakan kegiatan produktif tertentu.
- b. Mengefektifkan pelaksanaan penyuluhan, meliputi: kerajinan rumah tangga, menyelenggarakan usaha kecil (warung kopi, warung nasi, kedai kebutuhan pokok di rumah tangga). Untuk mengoptimalkan hasil kegiatan penyuluhan dimaksud, maka sebaiknya para penyuluh memilih beberapa usaha untuk dibina dan dijadikan model percontohan.
- c. Pelaksanaan pemagangan. Ibu rumah tangga, atau anak-anak mereka yang sudah selesai pendidikan sekolah menengah yang belum sempat lanjut ke pendidikan tinggi, diikutkan dalam program magang pada usaha binaan yang telah ada (usaha yang dibina oleh para penyuluh lapang), atau kerjasama dengan pengusaha kecil yang ada di desa/di kota yang bersangkutan. Dari pemagangan itu, diharapkan mereka mampu bekerja mandiri sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

- d. Pendampingan. Menempatkan tenaga penyuluh lapang, tenaga perguruan tinggi, atau tenaga sukarela dari LSM untuk menjadi pendamping atau konsultan teknis dari usaha yang dijalankan keluarga miskin.
 - e. Pendidikan dan latihan kerja khusus. Diklat khusus diberikan untuk memberikan keterampilan kepada keluarga miskin sesuai potensi insaniah dan bakat mereka masing-masing. Diklat ini diberikan untuk dapat membuka usaha mandiri, misalnya : Latihan membuat telur asin, asinan buah, juice buah, menjahit, membatik, membuat ikan asin, teknik sablon, dan sebagainya.
- 2. Program ketersediaan alat-alat produksi (KAP), adalah program yang ditujukan untuk membekali keluarga miskin akan alat-alat produktif. Program ini mencakup subprogram :**
- a. Menyediakan alat-alat produksi yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usaha keluarga miskin yang dibina. Misalkan, pada usaha penjahitan, tidak perlu semua anggota menyediakan mesin obras. Cukup mengusahakan mesin jahit biasa. Mesin obras diserahkan kepada Unit Usaha Koperasi untuk dioperasikan guna memenuhi kebutuhan anggota akan jasa mesin obras (jahit pinggir dan jahit lubang kancing).
 - b. Menyediakan peralatan dengan kapasitas alat produksi yang seimbang dengan kebutuhan.
 - c. Menyediakan fasilitas kredit untuk investasi pengadaan alat-alat kerja dengan paket yang terbatas, cukup untuk menjalankan usaha kerajinan di rumah (membeli mesin jahit,

peralatan sablon), dan modal kerja yang berbunga lunak dan jangka waktu yang sesuai.

- d. Menyediakan fasilitas kredit investasi untuk memenuhi kebutuhan permodalan dari binaan yang sudah berkembang dan bersyarat untuk diberikan pinjaman komersial, dan
- e. Menyediakan bantuan hibah alat-alat produksi untuk dipakai bersama oleh kelompok keluarga miskin yang dibina.

3. Keterlibatan dalam Aktivitas Ekonomi (KAE), dengan subprogram sebagai berikut:

- a. Memperjelas bidang usaha yang dijalankan oleh setiap anggota yang berada dibawah binaan Unit Usaha Bersama Masyarakat yang dibentuk di desa/kelurahan tertentu. Unit Usaha ini mengkoordinir kelompok usaha yang ada, dan dijalankan oleh anggota dari para keluarga miskin. Dengan adanya kejelasan usaha yang dijalankan, maka akan dapat diminimumkan persaingan antar keluarga miskin, serta betul-betul sesuai bakat dan potensi insaniah masing-masing.
- b. Memberikan kepastian pasar hasil produksi yang dihasilkan oleh masing-masing anggota yang tergabung dalam suatu kelompok usaha tertentu. Kepastian pasar ini yang menjadi akar masalah yang perlu rumusan pemecahan dari awal pelaksanaan program. Manajer Kelompok Usaha dan Manajer Umum Unit Usaha Bersama Masyarakat perlu membangun kemitraan dengan pengusaha di kota/kabupaten. Usaha mendapatkan pasar ini perlu mendapatkan respon yang baik dari instansi terkait.
- c. Memberikan dukungan bantuan disain. Pengusaha mitra (dahulu lazim disebut Bapak Angkat) selain kemitraan untuk membeli produk yang mereka hasilkan, juga memberikan

bantuan disain produk yang dibutuhkan, termasuk detail mutunya. Dengan demikian, pengusaha mitra akan memperoleh kepastian jaminan mutu dan usaha masyarakat miskin akan memperoleh jaminan kepastian pasar.

- d. Bantuan jaminan kepastian sumber bahan. Perusahaan mitra, dan juga instansi pemerintah terkait, harus memiliki kepedualian untuk membantu tersedianya bahan baku yang diperlukan oleh usaha-usaha yang dibina oleh Unit Usaha Bersama Masyarakat. Jaminan ketersediaan bahan baku itu, akan menjadi pendukung kesinambungan usaha.
- e. Pemerintah daerah harus memberi kemudahan perizinan usaha atas usaha yang diselenggarakan oleh keluarga miskin. Pasar-pasar tradisional harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada ruang yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- f. Memberikan insentif keringanan pajak dan retribusi, paling tidak selama jangka waktu tertentu.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa temuan pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keluarga miskin yang ada Kabupaten Donggala, yaitu umumnya berpendidikan rendah, sedikit memiliki keterampilan di luar sektor atau pekerjaan pokoknya, pekerjaan pokok sebagai petani, memiliki modal yang sedikit dalam mengembangkan kegiatan sektor ekonominya.
2. Karakteristik masyarakat miskin di Kabupaten Donggala umumnya berada pada umur produktif, suku Kaili, telah berkeluarga, taat menjalankan ajaran agama, serta memiliki pendapatan yang minim yang sebagian besar bersumber dari kegiatan sebagai petani.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar adalah (a) Rendahnya kesempatan bekerja, yang disebabkan karena sebahagian besar dari keluarga miskin kurang atau tidak memiliki keterampilan, kurang atau tidak memiliki pengalaman bekerja mandiri di sektor informal, dan (b) Rendahnya sumber daya insani yang dimiliki, yang disebabkan karena sebahagian besar dari keluarga miskin kurang atau tidak pernah mengikuti job training, penyuluhan, pemagangan, pengam-pingan, dan diklat khusus, serta (c) Rendahnya ketersediaan alat produksi yang mendukung usaha, yang disebabkan oleh adanya keterbatasan dana.

4. Faktor-faktor yang dapat menghambat terlaksananya secara efektif program peningkatan pendapatan keluargamiskin di Kabupaten Donggala adalah:

- Ditinjau dari aspek peningkatan mutu sumber daya insani, bahwa (a) Model pengelolaan sadagah, Infag dan Zakat (SIZ) dikelola secara konvensional, (b) biaya pendidikan dan pelatihan, serta (c) biaya hidup masyarakat miskin terus meningkat.
- Ditinjau dari aspek ketersediaan alat produksi, bahwa (a) Modal investasi dan modal kerja yang terbatas, (b) harga alat produksi yang semakin meningkat, (c) tuntutan prasyarat kredit dari lembaga keuangan makin ketat, dan (d) prasyarat perolehan dana hibang juga makin ketat.
- Ditinjau dari aspek keterlibatan masyarakat miskin dalam aktivitas ekonomi, bahwa (a) bidang usaha yang dijalankan memiliki peluang pasar yang kurang jelas, (b) selektivitas dan standardisasi bahan baku atau produk yang diinginkan pasar semakin tinggi, dan (c) biaya bahan pendukung usaha terus meningkat.
- Ditinjau dari aspek kesempatan bekerja, bahwa (a) wadah untuk pemberdayaan diri keluarga miskin baik dalam kehidupan sosial maupun kegiatan produktif belum mendukung, (b) tuntutan kompetensi di pasar kerja makin tinggi, dan (c) pemanfaatan teknologi mutakhir dalam teknologi pengolahan makin diminati industri.

B. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pemetaan potensi keluarga miskin mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten

2. Menyusun dan melakukan pemetaan sektor usaha yang produktif untuk keluarga miskin
3. Perlu dukungan moril pemerintah dan masyarakat luas kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, melalui penyuluhan secara berkesinambungan baik dibidang agama, sosial budaya serta kegiatan ekonomi.
4. Meningkatkan sumberdaya insani keluarga miskin dengan memberikan pendidikan murah/gratis dan berkualitas untuk anak-anak atau keluarga miskin, terutama pendidikan dasar dan menengah, agar keluarga miskin mempunyai kemampuan dan alternatif untuk bekerja di berbagai sektor informal dan formal.
5. Peningkatan keterampilan keluarga miskin melalui training/diklat khusus, serta menyiapkan pusat latihan informasi tenaga kerja dan teknologi terpadu (BAPTEK).
6. Keluarga miskin yang sudah dilatih untuk menjalankan usaha tertentu diorganisir dalam suatu kelompok usaha untuk memudahkan pembinaan dan koordinasi. Tenaga sukarela dari LSM dan Perguruan Tinggi dapat diperbantukan sebagai tenaga pendamping pada kelompok usaha yang sudah dibentuk
7. Menyediakan layanan kesehatan murah sampai gratis tetapi bermutu kepada segenap keluarga miskin.
8. Menyediakan sarana produksi (alat-alat produksi) kepada warga miskin, misalnya di pedesaan berupa bantuan bibit unggul, dan alat-alat produksi lainnya sesuai pekerjaan mereka, termasuk di perkotaan.
9. Memperbanyak proyek padat karya, sehingga keluarga miskin mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

10. Memperbaiki irigasi sehingga sawah tadah hujan dapat diubah menjadi sawah berpengairan teknis.
11. Menyusun data base potensi hasil-hasil produksi dan pusat informasi pasar
12. Menyusun dan melakukan pemetaan wilayah strategis pengembangan usaha.
13. Menyusun Term Of Reference (TOR) anggaran bantuan modal usaha masyarakat rentan.
14. Mengaktifkan peran organisasi sosial masyarakat desa
15. Menarik minat investor untuk memberikan bantuan modal dengan model binaan.
16. Menyiapkan lokasi strategis dan layak untuk pengembangan usaha.
17. Menyediakan sarana pemasaran di perkotaan yang memadai dan kondusif dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat pedesaan, termasuk keluarga miskin yang berpihak kepada kepentingan warga miskin dimaksud.
18. Melakukan upaya perbaikan mutu sumber daya manusia dan teknologi produksi sektor primer (pertanian, perikanan, dan perkebunan) dan perbaikan layanan pascapanen.
19. Pemerintah Kabupaten Donggala bekerjasama dengan RRI dan koran lokal untuk menyelenggarakan rubrik layanan informasi kepada warga pinggiran dan pedesaan sehingga dapat menjangkau pula para keluarga miskin yang tidak mampu memiliki akses informasi.
20. Memberdayakan Badan Amil Zakat (Bazis) yang ada dimasing-masing Kecamatan sebagai lembaga yang menyalurkan peralatan produktif dan modal bersyarat lunak (qardhul hasan) kepada keluarga miskin. Dana masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang dihimpun melalui Bazis, dapat dipakai untuk menjalankan model pengentasan berupa pemutusan rantai kemiskinan seperti yang dijalankan di

Malaysia. Anak-anak keluarga miskin yang memenuhi syarat direkrut untuk disekolahkan dan diberikan latihan keterampilan untuk dapat bekerja mandiri. Biaya pendidikan dan latihan itu dibayarkan dari Dana Bazis. Kelak dikemudian hari, anak-anak keluarga miskin akan memutar haluan dan berubah menjadi keluarga sejahtera karena telah memiliki pekerjaan tetap. Tekanan program adalah kepada pembinaan dan peningkatan mutu sumber daya insani anak-anak keluarga miskin.

21. Membangun Sistem Informasi Manajemen/administrasi pengelolaan SIZ

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. **Kerangka Acuan Kegiatan Litbang Tahun 2005**, Balitbang Prop. Sulsel.
- Anonim. 2003. **Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003.**, Buku 1 Kabupaten, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- Anonim. 2003. **Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003.**, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Pulau Sulawesi.
- Anonim. 2003. **Indikator Kesejahteraan Rakyat Pulau Sulawesi Tahun 2003.**, Badan Pusat Statistik Pulau Sulawesi.
- Adarno, Theodor, and Max Harkheimer, 1986, **Dialectic of Elighteanment**, Verso, London
- Amin Rais, 1995, **Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia**, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Arief R. Karseno, 2002. **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Lokalitas Dalam Perspekti Ekonomi**, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Joggakarta
- Bambang Dipokusumo, 2004, **Isu dan Strategi Menuju Sistem Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan dan Penanggulangan Kemiskinan**, Working Paper, September 2004, Mataran
- Chambers,Robert' 1987. **Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang**,LP3ES, Jakarta.
- Ellis, G.F.R., 1984, **The Dimensions of Poverty** (Dalam Sosial Indicator Research
- Ferdinand, Augusty (2000). **"Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis S2 dan Disertasi S3"**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldthorpe, J.E., 1992., **Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan.**, Jakarta, Gramedia.

- Gunawan Sumodiningrat, 2002, **Sinkronisasi Program Penanggulangan kemis-kinan**, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM, Yogyakarta
- Hair, J. F., Jr., Rolph, E. A., Romald, L. T., dan William , G.B, 1998. “**Multivariate Data Analysis**”, Fifth Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Ismawan, Bambang, 1992, **Partisipasi dan Dimensi Keswadayaan**, (Tinjauan Kearah Persepsi Yang Utuh), LP3ES, Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kartodirdjo, Sartono, 1993. **Perkembangan peradaban priyayi**. Gama Press, Yogyakarta
- Mahfud Nurnajamuddin, 2012. **Strategi Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan**. Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan.
- Makmun, 2003, **Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya**, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 7 Nomor 2.
- Masoed, Mochtar,. 1993. Ekonomi politik Pembangunan dan Pemberdayaan Rakyat , Dalam Prospektif Volume 5 No. 1 dan 2, PPSK, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1994, **Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal**, Aditya Media, P3PK, UGM, Yogyakarta.
- Mursi, Abdul Hamid, 1997, **SDM yang Produktif (Pendekatan Al-Qur'an dan Sains)**, Gema Insani Press, Jakarta
- Nugroho, Heru, 1995, **Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan**, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Rahardjo, Dawan, 1992, **Keswadayaan Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi**, PT. Pustaka, LP3ES, Jakarta.
- Soejatmoko, 1986, **Masalah Sosial Budaya Tahun 2000**, Tiara Wacana, Jakarta
- Soemardjan, Selo., 1984. **Land Reform Di Indonesia, Dalam Dua Abad Penguasaan Tanah.**, Gramedia, Jakarta

- Soetrisno, Loekman, 1995. **Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan**, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong & Karnaji, 2001. **Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan di Surabaya**, Cetakan Pertama, Surabaya
- Tadjuddin Noer Effendi, 1995, **Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan**, Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1999. **Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993, **Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan**, Makalah untuk Seminar Bulanan P3PK UGM, Yogyakarta.

Lampiran 1 DAFTAR KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Item	Jawaban pilihan
1. Nama Responden	
2. Alamat b. Kecamatan c. Desa	
3. Jenis Kelamin	a. Laki-laki b. Perempuan
4. Umur	 Tahun
5. Suku	a. kaili b. Makassar c. Bugis d. Dampelas e. Suku lainnya
6. Agama	a. Islam b. Kristen c. Hindu d. Budha
7. Status Perkawinan	a. Kawin b. Belum kawin c. Duda d. Janda
8. Pendidikan terakhir	a. Tidak Tamat SD b. Tamat SD c. Tamat SLTP d. Tamat SLTA e. Diploma/Sarjana
9. Pekerjaan pokok	a. Petani b. Tukang Kayu/Batu c. Jual-jualan d. Buruh e. Nelayan f. Tukang Jahit g. Lainnya
10. Jumlah Anak	orang
11. Jumlah Tanggungan, termasuk bukan anak	orang
12. Frekuensi Makan Sehari	a. Kadang-kadang tidak makan b. Satu Kali c. Dua Kali d. Tiga Kali e. Lebih dari tiga kali
13. Frekwensi Makan Daging/Ayam Seminggu	a. Tidak Pernah b. Satu Kali c. Dua Kali d. Tiga Kali e. Lebih dari tiga kali
14. Frekwensi Minum Susu Seminggu	a. Tidak Pernah b. Satu Kali c. Dua Kali d. Tiga Kali e. Lebih dari tiga kali
15. Sumber Air Minum	a. Air Hujan b. Sungai c. Mata Air Tidak terlindung d. Sumur e. PAM
15. Beli Baju Baru Setahun	a. Tidak Pernah b. Satu stel setahun c. Dua stel setahun d. Tiga stel setahun e. Lebih dari tiga stel setahun
17. Bahan Bakar Untuk Memasak	a. Kayu Bakar b. Arang c. Minyak Tanah d. Gas
18. Status Kepemilikan Rumah	a. Tidak Punya Rumah b. Rumah Kontrakan c. Rumah Saudara d. Rumah Mertua e. Rumah Sendiri f. Lainnya, sebutkan
19. Luas Bangunan Rumah	a. Kurang dari 8 M3/orang b. 8 M3/orang atau lebih

20. Jenis Dinding Rumah	a. Gemaca b. Papan c. Tembok Murahan
21. Jenis Lantai Rumah	a. Lantai Tanah b. Lantai Semen Biasa c. Lantai Tegel d. Papan
22. Jenis Atap Rumah	a. Atap Rumbia b. Atap Genteng c. Atap Seng
23. Fasilitas MCK	a. Tidak memiliki fasilitas MCK b. Memanfaatkan sungai/laut/rawa-rawa c. memiliki Fasilitas MCK
24. Sumber Penerangan Rumah	a. Tidak menggunakan listrik b. Menggunakan Listrik
25. Kepemilikan Tabungan	a. Tidak memiliki tabungan b. Memiliki Tabungan Rp.
26. Kepemilikan barang yang mudah dijual	a. Tidak memiliki barang yg mudah dijual b. Memiliki barang yg mudah dijual dengan nilai Rp. 600.000 atau kurang c. Memiliki barang yg mudah dijual dengan nilai lebih dari Rp. 600.000
27. Pendapatan per bulan	a. < Rp. 250.000,- b. Rp. 250.000 – Rp. 500.000,- c. Rp. 500.000 – Rp. 750.000,- d. Rp. 750.000 – Rp. 1.000.000,- e. > Rp. 1.000.000,-
28. Sumber Pandapatan	a. Bertani dgn luas lahan kurang atau sama dengan 0,5Ha b. Bertani dgn luas lahan lebih dari 0,5Ha c. Buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan dgn pendapatan kurang atau sama dengan Rp.600.000/bulan d. Buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan dgn pendapatan lebih dari Rp.600.000/bulan e. Tukang Kayu/Batu dan jual-jualan f. Usaha lainnya
29. Kemampuan Menye- kolahkan Anak	a. Tidak mampu b. Kurang mampu c. Cukup mampu d. Mampu e. Sangat mampu
30. Tingkat Pendidikan Anak	a. Tidak Tamat SD b. Tamat SD c. Tamat SLTP d. Tamat SLTA e. Diploma/Sarjana
31. Ketaatan menjalankan ajaran agama	a. Tidak taat b. Kurang taat c. Cukup taat d. Taat e. Sangat taat
32. Kesanggupan membiayai pengobatan keluarga	a. Tidak sanggup b. Kurang sanggup c. Cukup sanggup d. Sanggup e. Sangat Sanggup
33. Tempat Pengobatan Keluarga	a. Dukun b. Puskesmas c. Rumah Sakit d. Dokter Praktek
34. Bila bertani	a. Menggarap lahan sendiri b. Menggarap lahan majikan c. Menyewa/menyakap

35. Luas sawah yang dimiliki	 ha
36. Luas garapan seluruhnya	 ha
37. Jenis lahan garapan	a. tadah hujan b. berpengairan teknis c. berpengairan tradisional
38. jenis usaha yang digeluti selain tani :	a. perdagangan b. industri rumah tangga c. jasa

B. PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN KELUARGA

No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
		Kesesuaian pernyataan (%)				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1	Pendapatan yang kami peroleh telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga & pendidikan anak kami					
2	Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan, utamanya pendidikan formal.					
3	Seluruh anak kami yang usia sekolah telah melanjutkan studi pada tingkat pendidikan yang tinggi.					
4	Pekerjaan tetap saya dan keluarga telah memadai untuk memenuhi kebutuhan					
5	Kesehatan sangat diutamakan dalam lingkungan keluarga. Biasanya kami melakukan pemeriksaan atau perawatan kesehatan melalui layanan medis (rumah sakit, Puskesmas atau Dokter praktek)					
6	Sebagai umat beragama, kita harus taat menjalankan ibadah. Untuk itu saya dan keluarga saya seluruhnya taat menjalankan ibadah sesuai ajaran agama					

C. PENINGKATAN KESEMPATAN BEKERJA

No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
		Kesesuaian Pernyataan (%)				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1	Selama ini saya menekuni pekerjaan atau bidang usaha sesuai dengan keterampilan yang saya dimiliki					
2	Saya mempunyai pengalaman untuk bekerja mandiri di sektor formal dan informal					
3	Saya mempunyai pengalaman bekerja sebagai tenaga kerja di sektor informal lebih dari 10 tahun					
4	Saya lebih suka bekerja secara mandiri sekalipun pendapatannya lebih kecil. Kerja mandiri memungkinkan mencapai perkembangan yang cukup berarti dimasa datang.					
5	Barang bekas tidak selalu berarti sampah. Barang bekas dapat diolah dan diproses menjadi barang-barang yang berguna dan memiliki nilai ekonomi. Saya memiliki keterampilan utk memanfaatkan barang bekas					
6	Bekerja itu sekalipun disektor informal dan penghasilannya kecil tetap lebih baik dari pada menganggur, dan atau mengemis					

D. PENINGKATAN MUTU SUMBERDAYA INSANI

No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
		Kesesuaian Pernyataan (%)				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1	Saya sering mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan atau bidang usaha yang saya tekuni					
2	Saya sering dan suka mengikuti penyuluhan sesuai dengan pekerjaan atau bidang usaha yang saya tekuni					

3	Saya senang mengikuti magang atau ikut bekerja pada orang yang sudah mapan. Magang adalah cara utk dapat lapangan kerja mandiri					
4	Saya senang mengikuti pendampingan sesuai dengan pekerjaan atau bidang usaha yang saya tekuni. Melalui pendampingan, saya dapat menimba pengetahuan kerja					
5	Kita perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan bakat dan minat kita, atau sesuai bidang usaha yang diharapkan dimasa datang					

E. KETERSEDIAAN ALAT PRODUKSI

No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
		Kesesuaian Pernyataan (%)				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1	Dalam mengelola bidang usaha yang saya tekuni, sangat didukung oleh ketersediaan jenis alat produksi yang saya miliki/gunakan					
2	Bidang usaha yang saya tekuni ditunjang oleh kapasitas alat produksi yang dimiliki. Oleh karena itu, kegiatan produksi selalu terjamin kelancarannya					
3	Dalam mengelola bidang usaha yg saya tekuni, modal kerja cukup tersedia utk membiayai operasional sehari-hari					
4	Bidang usaha yang saya tekuni selama ini sudah sampai pada kebutuhan untuk diperluas. Tersedia kredit investasi untuk membiayai kelancaran usaha tersebut, dapat diperoleh dengan mudah dan murah					
5	Dalam mengelola bidang usaha yang saya tekuni, saya selalu mendapatkan bantuan (hibah) dari					

	perusahaan atau instansi pemerintah terkait.					
--	--	--	--	--	--	--

F. KETERLIBATAN DALAM AKTIVITAS EKONOMI

No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
		Kesesuaian Pernyataan (%)				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1	Bidang usaha yang saya tekuni selama ini adalah usaha mandiri yang mempunyai kejelasan prospek dimasa yang akan datang					
2	Bidang usaha yang saya kelola selama ini, produksinya mempunyai kepastian pasar dimasa yang akan datang					
3	Bidang usaha yang saya kelola sekarang ini sangat memerlukan dukungan bantuan disain /rancangan produk dari pihak berkompeten					
4	Bidang usaha yang saya kelola sekarang ini mempunyai kepastian sumber bahan baku dimasa mendatang					
5	Bidang usaha yang saya kelola sekarang ini mempunyai kemudahan dalam memperoleh izin usaha, dan bukan usaha yang telah mendapatkan peringatan dari yang berwenang					
6	Bidang usaha yang saya tekuni selama ini selalu mendapatkan keringanan dalam hal pembayaran pajak/pajak daerah/retribusi					

G. PERAN PEREMPUAN

No Urut	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
		Kesesuaian Pernyataan (%)				
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1	Menambah pendapatan keluarga karena pendapatan suami relatif kecil					

2	Memanfaatkan berbagai keunggulan (pendidikan dan keterampilan) yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan					
3	Menunjukkan eksistensi sebagai perempuan yang mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga					
4	Ingin memiliki pendapatan sendiri					
5	Pendapatan yang diperoleh untuk mendapatkan status atau kekuasaan lebih besar didalam kehidupan keluarga					
6	Bekerja untuk memperoleh pendapatan sangat mengganggu aktivitas internal rumah tangga					
7	Bekerja untuk memperoleh pendapatan sangat mengganggu tanggungjawab terhadap keluarga					
8	Tanggungjawab keluarga mengganggu pekerjaan untuk memperoleh pendapatan					
9	Dari pada trauma karena tinggal dalam rumah, maka lebih baik bekerja untuk memperoleh pendapatan					
10	Saya harus bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena tidak membiarkan anak-anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi					
11	Banyaknya anak yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga dalam menghasilkan pendapatan					
12	Keterbatasan perempuan dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena terbatasnya akses perempuan					

	dalam program kredit					
13	Keterbatasan perempuan dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena terbatasnya informasi pasar atau bisnis					
14	Keterbatasan perempuan dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena keterbatasan manajemen dan pengembangan usaha					
15	Keterbatasan perempuan dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena terbatasnya ketrampilan dan pendidikan perempuan untuk memperoleh peluang dan kesempatan kerja yang lebih baik					
16	Keterbatasan perempuan dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena kurangnya kreasi sehingga hasilnya tidak pernah memuaskan					
17	Keterbatasan perempuan dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga karena hanya sekedar ikut-ikutan dengan perempuan lainnya.					
18	Dampak buruk yang ditimbulkan dalam keluarga akibat bekerja untuk menghasilkan pendapatan					
						
						
19	Pembinaan apa yang diharapkan dari pemerintah :					
						
						